



RENCANA STRATEGI **2018 - 2023**



Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Bone

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadiran Alloh ‘*Azza Wa Jalla*, Rancangan Rencana Strategi (Rancangan Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 telah selesai disusun.

Penyusunan Rancangan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen ini juga telah berpedoman serta mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018–2023.

Dokumen Rancangan Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi, misi, dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Bone, kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program/Kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut. Selain penetapan IKU untuk pencapaian sasaran strategis kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten

Bone Tahun 2018-2023, dalam dokumen ini juga dirumuskan dan ditetapkan penetapan indikator kinerja utama untuk pencapaian sasaran strategis organisasi perangkat daerah (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) yang terjabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas dan penunjang dalam mendukung pencapaian dari sasaran-sasaran tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa Rancangan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Rancangan Renstra ini.

Watampone, Maret 2019

Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Bone



H. ASKAR, S.ST., M.Si.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19681231 199803 1 042

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BONE..... | 11 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air..... | 11 |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air..... | 33 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2013- 2017..... | 58 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 63 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | 65 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan .. | 65 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih... | 67 |

| | | |
|--|--|----|
| 3.3. | Telaahan Rancangan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Rancangan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | 69 |
| 3.4. | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 71 |
| 3.5. | Penentuan Isu-Isu Startegis..... | 72 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | | 75 |
| 4.1. | Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 76 |
| 4.2. | Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 77 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | | 81 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | | 83 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | | 95 |
| BAB VIII PENUTUP..... | | 97 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1. Sarana dan Prasarana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Bone | 36 |
| Tabel 2. 2. Sungai Dan Saluran Pembuang Yang Telah Tersentuh Oleh Dana APBD Kabupaten Bone | 37 |
| Tabel 2. 3. Embung Yang Telah Tersentuh Oleh Dana APBD Kabupaten Bone. | 49 |
| Tabel 2. 4. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bone Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi | 53 |
| Tabel 2. 5. Aset, Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air di Kabupaten Bone Hingga Tahun 2018 | 58 |
| Tabel 2. 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Tabel T-C.23.) | 59 |
| Tabel 2. 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Tabel T-C.24.) | 62 |
| Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.25) | 79 |
| Tabel 4. 2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 | 80 |
| Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Tabel T-C.26) | 82 |
| Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (Tabel T-C.27) | 85 |
| Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD | 96 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone | 32 |
|--|----|

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih. Secara umum Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni:

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang;
2. Langkah-langkah strategis dan sasaran yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas.

Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra ini sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone akan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas untuk menerjemahkan,

mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Kabupaten Bone.

Tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis sesuai Tupoksi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023. Selain itu Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rancangan Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3226).

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi-Selatan tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Propinsi Sulawesi-Selatan tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bone.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

28. Peraturan Bupati Bone Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 62).
29. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penulisan Rancangan Rencana Strategis, yaitu :

1. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis, yaitu :

1. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada kebijakan Sumber Daya Air tingkat nasional dan provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

2. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone.
3. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone Tahun 2019-2023.
4. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
5. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 disusun, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rancangan Renstra

PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rancangan Renstra PD;

- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri dari : Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan , telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rancangan Renstra K/L dan Rancangan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;
- Bab IV Tujuan dan Sasaran, terdiri dari: tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan merupakan penjabaran visi Bupati Bone yang lebih spesifik dan terukur. Rencana sasaran yang hendak dicapai, strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistik, rasional dan konprehensif.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, Strategi diwujudkan dalam kebijakan program, yang terakhir pada Mengenai Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan terdiri dari program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VIII Penutup

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN BONE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Mengacu Kepada Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone maka organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone mengarahkan kepada Struktur Organisasi pola maksimal.

A. Organisasi Dinas, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Bina Teknik dengan 3 Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Bina Teknik.
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi Bina Teknik.
 - c. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air.
4. Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk 3 Seksi :
 - a. Seksi Konservasi Danau, Embung dan Waduk.
 - b. Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir.
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk.
5. Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku 3 Seksi :
 - a. Seksi Irigasi dan Air Baku.
 - b. Seksi Rawa dan Pantai.

- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.
6. Kepala Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Seksi :
 - a. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air.
 - b. Seksi Bina Kelembagaan.
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air.

B. Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok:

- a) Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Bone.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin a) dan b), Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air meliputi bina teknik, pembinaan pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai, danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;
- penyelenggaraan urusan sumber daya air serta pelayanan umum di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai, danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;
- pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya air serta pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai,

danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;

- Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

- Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- Pelaksanaan pembinaan staf; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
- Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- Membuat rencana kerja tahunan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
- Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program

pendidikan dan latihan;

- Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- Melaksanakan pembinaan staf; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

3. Bidang Bina Teknik

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Bina Teknik mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, strategi, rencana pengembangan jangka panjang dan jangka menengah, menyelenggarakan perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan melaksanakan monitoring evaluasi kinerja sarana dan prasarana dasar sumber daya air serta menyiapkan data dan informasi sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas maka Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi :

- Penyiapan data dasar berupa peta, data potensi dan pemanfaatan air serta hasil penelitian lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan, pengendalian pembangunan, prasarana dan sarana sumber daya air;
- Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang pengelolaan sumber daya air;
- Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perencanaan Bina Teknik

Seksi Perencanaan Bina Teknik membantu kepala bidang bina teknik yang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perencanaan bina teknis;
- Melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi sumber daya air;
- Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
- Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

b. Seksi Monitoring, Evaluasi Bina Teknik

Seksi Monitoring, Evaluasi Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal monitoring, evaluasi Bina Teknik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud Seksi Monitoring, Evaluasi Bina Teknik mempunyai fungsi :

- Melakukan monitoring fisik keuangan dan evaluasi kinerja sarana dan prasarana sumber daya air;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana jaringan irigasi dan monitoring keadaan kebutuhan air irigasi;
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi irigasi;
- Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya

c. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal Pemngumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan data dan informasi sumber daya air;
- Melakukan pengolahan data dan informasi sumber daya air;
- Melakukan penyebarluasan data dan informasi sumber daya air;
- Melakukan penyimpanan data dan informasi sumber daya air;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

4. Bidang Sungai, Danau dan Waduk

Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengembangan dan konservasi pelestarian sungai, danau. Waduk dan sumber daya air lainnya, melaksanakan perbaikan sungai, danau, waduk dan sarana prasarana pengendalian banjir.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan, pembinaan pengelolaan sungai, danau, waduk serta sumber daya air lainnya;
- Perencanaan teknis dan pelaksanaan teknis pengembangan sungai, danau dan waduk;
- Pelaksanaan, pembinaan pengaturan teknis dan pengendalian serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- Pelaksanaan, pengendalian kelestarian sumber daya air dan penyusunan AMDAL sumber daya air; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

a. Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk

Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal pengembangan Konservasi, Danau, Embung dan Waduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Konservasi Danau, Embung dan Waduk mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk;
- Melaksanakan pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air

sungai, danau, embung dan waduk; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya.

b. Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir

Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal pemeliharaan Sungai dan Pengendalian Banjir.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir mempunyai fungsi :

- Menyiapkan perencanaan di bidang inventarisasi, pengendalian dan upaya peningkatan nilai atas sumber daya yang ada pada sungai dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana sungai dan fasilitas lainnya dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- Melaksanakan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai;
- Melakukan upaya peningkatan nilai sumber daya yang ada pada sungai;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang inventarisasi, pengendalian dan upaya peningkatan nilai atas sumber daya yang ada pada sungai dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya.

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal Operasi dan

Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengandaian Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan, pemeliharaan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk;
- Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya.

5. Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku

Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku mempunyai tugas kepala dinas dalam melaksanakan peningkatan, pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai, irigasi primer dan sekunder serta sarana prasarana air baku dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku;
- Pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder;

- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai;
- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku;
- Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

a. Seksi Irigasi dan Air Baku

Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal kegiatan Irigasi dan Air Baku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Irigasi dan Air Baku mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

b. Seksi Rawa dan Pantai

Seksi Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal Rawa dan Pantai.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Rawa dan Pantai mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehailitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai;
- Melaksanakankan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam hal Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perencanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah;
- Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air;
- Melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyediaan alokasi air untuk berbagai kebutuhan;

- Mengumpulkan dan menyusun data untuk rencana tata tanam global;
- Mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan operasi, pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

6. Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air serta pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air.

Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perencanaan di bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air
- Pembinaan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air termasuk air baku dan tanah bantaran, tanah pengairan, penambahan bahan galian golongan – c pada alur sungai, serta pembinaan penyuluhan dan perizinan;
- Pembinaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- Pembinaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air,

kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta Pembinaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

a. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air

Seksi Hidrologi dan Kualitas Air dipimpin oleh kepala seksi Hidrologi dan Kualitas Air yang mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perencanaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air
- Memproses pemberian rekomendasi izin penambangan bahan galian C pada sumber air, alur sungai, jaringan irigasi dan saluran drainase;
- Memberikan rekomendasi izinpembuangan limbah cair pada sumber-sumber air;
- Memberikan rekomendasi izin pengembangan dan pengelolaan air permukaan dan air tanah;
- Melaksanakan pembinaanpemanfaatan sumber daya air dan pengamanan aset sumber daya air;
- Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan air dan pengamanan aset;
- Memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, saluran drainase dan bangunan pelengkapnnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Airterkait tugasnya.

b. Seksi Bina Kelembagaan

Seksi Bina Kelembagaan dipimpin oleh kepala seksi Bina Kelembagaan yang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perencanaan pembinaan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sumber daya air;
- Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- Memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan air di tingkat usaha tani atau saluran tersier;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sumber daya air; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan prasarana dan sarana sumber daya air

Seksi Pengendalian Pemanfaatan prasarana dan sarana sumber daya dipimpin oleh kepala seksi Pengendalian Pemanfaatan prasarana dan Sarana sumber daya Air yang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perencanaan pengendalian pemanfaatan sumber daya Air;
- Melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air pada wilayah sungai;
- Melaksanakan pemanfaatan sumber daya air;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

7. Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPT) dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurus.

Susunan Organisasi UPT Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT);
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Pelaksana.

a. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan sebagian tugas yang menyangkut operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Pelaksanaan administrasi UPT;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPT, meliputi :

- Menyusun RRTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A;
- Menetapkan besarnya faktor-Kuntuk pembagian air jika debit sungai menurun;
- Mengadakan rapat dikantor UPT setiap minggu untuk

mengetahui permasalahan operasi, hadir para juru pengairan, petugas pintu air (PPA),petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A;

- Rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, hadir para juru pengairan,petugas pintu air (PPA),petugas operasi bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A;
- Menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA Kabupaten daam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- Membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi dan pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A;
- Membuat Laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

b. Tugas dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas Membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasi kan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- Mengumpulkan,Pengelolaan bahan data/informasi guna penyusunan rencana kerja UPT;
- Melaksanakan Pencatatan, pengarsipan dan memeriksa kelengkapan persuratankantor , menyiapkan dan menandatangani tanda terima surat atau baranglainnya;
- Menindaklanjuti surat dan mendistribusikan surat sesuai isi disposisi kepala UPT;
- Menginventarisir dan mendata jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai kontrakan/harian;

- Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas.
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Tugas dan Uraian Tugas Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Juru Operasi dan Pemeliharaan Membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- Melaksanakan instruksi dari Kepala UPT tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur;
- Memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan;
- Memberi saran kepada petani tentang awal tanam & jenis tanaman;
- Pengaturan giliran;
- Mengisi papan operasi;
- Membantu kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan;
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para pekerja saluran (PS) dan petugas pintu air (PPA);
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong;
- Bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi;
- Menyusun/memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati;
- Pengumpulan Data Debit;
- Pengumpulan data tanaman & kerusakan tanaman;

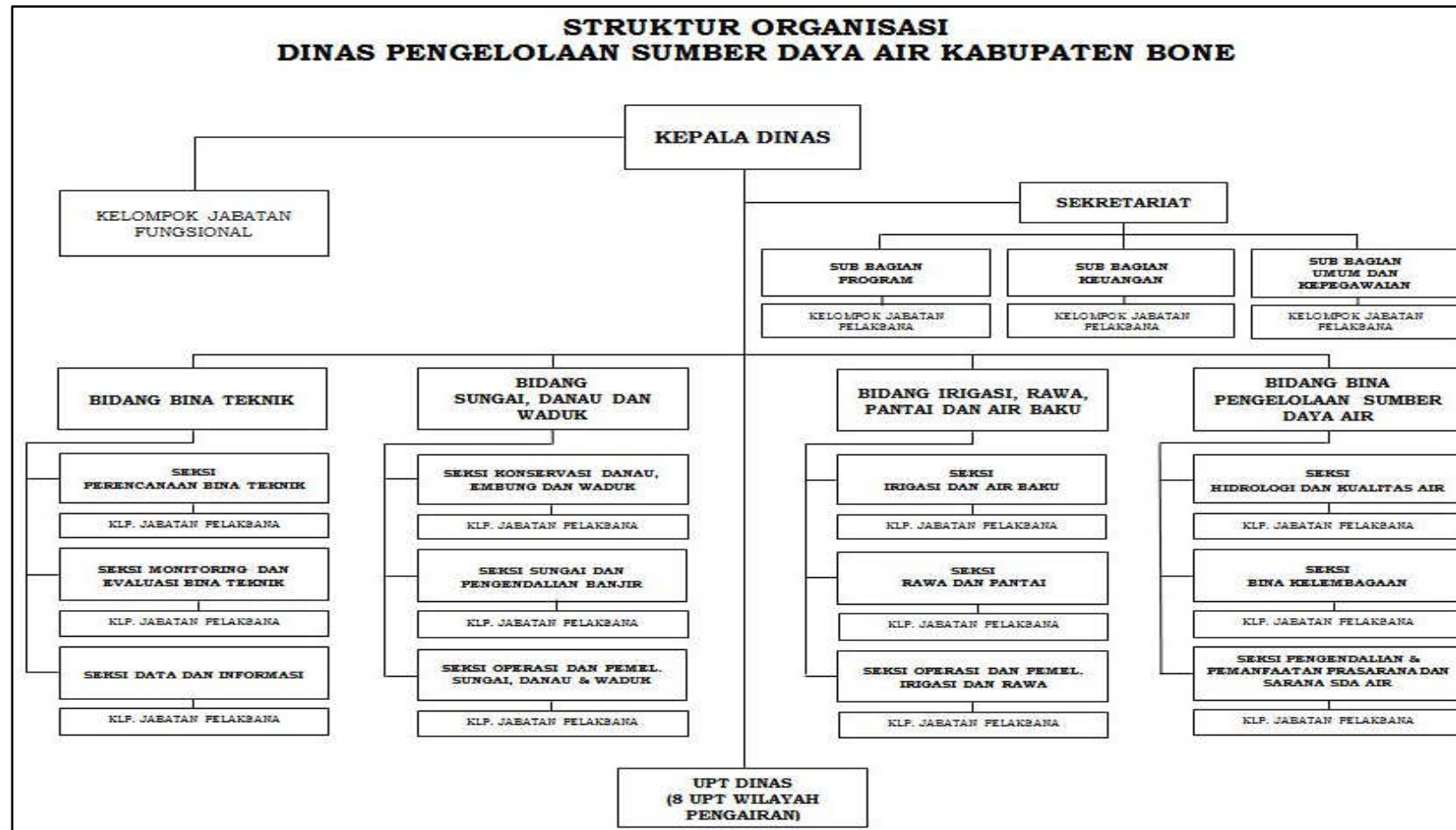
- Pengumpulan data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah);
 - Mengumpulkan kejadian banjir kepada UPT;
 - Melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada UPT;
 - Membuat Laporan pemeliharaan mengenai :Kerusakan saluran dan bangunan air, realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala, menaksir biaya pemeliharaan berkala.
- d. Tugas dan Uraian Tugas Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air
- Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air Membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan, Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :
- Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan pengolahan dibidang sumber daya air;
- e. Tugas dan Uraian Tugas Penjaga Pintu Air
- Penjaga Pintu Air membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan pintu-pintu air, Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :
- Membuka dan Menutup Pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah juru Operasi dan Pemeliharaan;
 - Memberi minyak pelumas pada pintu air;
 - Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
 - Membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap/bagi sadap dan di sekitar alat pengukur debit;
 - Mencatat kerusakan bangunan air/pintu air pada blangko pemeliharaan;
 - Memelihara saluran sepanjang 50 m di sebelah hilir bangunan sadap.

f. Tugas dan Uraian Tugas Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (POB)

Penjaga Pintu Air membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan bendung,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang;
- Melaksanakan pengurasan kantong lumpur;
- membuka/menutup pintu pengambilan utama,sesuai debit dan jadwal yang direncanakan;
- Mencatat besarnya debit yang mengalir/atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi;
- Mencatat elevasi muka air banjir;
- Memberikan minyak pelumas pada pintu-pintu air;
- Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
- Mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada blangko pemeliharaan;
- Membersihkan semak belukar di sekitar bendung.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone

(Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PSDA. 2018)

2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

A. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone di dukung dengan sumber daya Pegawai Negeri Sipil sebanyak 136 orang yang terdiri dari :

1. Berdasarkan Status Golongan / Kepangkatan

| | | | |
|------------------|----------|----|-----|
| • Golongan IV/b | sebanyak | - | Org |
| • Golongan IV/a | sebanyak | 1 | Org |
| • Golongan III/d | sebanyak | 3 | Org |
| • Golongan III/c | sebanyak | 14 | Org |
| • Golongan III/b | sebanyak | 12 | Org |
| • Golongan III/a | sebanyak | 25 | Org |
| • Golongan II/d | sebanyak | 2 | Org |
| • Golongan II/c | sebanyak | 37 | Org |
| • Golongan II/b | sebanyak | 7 | Org |
| • Golongan II/a | sebanyak | 17 | Org |
| • Golongan I/d | sebanyak | 1 | Org |
| • Golongan I/c | sebanyak | 16 | Org |
| • Golongan I/b | sebanyak | 1 | Org |

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

| | | | |
|-----------------------------|----------|---|-----|
| • Pendidikan Diklat PIM II | sebanyak | - | Org |
| • Pendidikan Diklat PIM III | sebanyak | 1 | Org |
| • Pendidikan Diklat PIM IV | sebanyak | 5 | Org |

3. Berdasarkan Eselonisasi

| | | | |
|----------------|----------|----|-----|
| • Eselon II/b | sebanyak | - | Org |
| • Eselon III/a | sebanyak | 1 | Org |
| • Eselon III/b | sebanyak | 4 | Org |
| • Eselon IV/a | sebanyak | 18 | Org |

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

- | | | | |
|-------------|----------|-----|-----|
| • Laki-laki | sebanyak | 126 | Org |
| • Perempuan | sebanyak | 10 | Org |

Selain Sumber Daya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdapat juga sumber daya pegawai yang berstatus Non PNS di bawah naungan UPT yang dibiayai dengan Sumber Dana APBN dan APBD sebagai berikut :

1. Tenaga UPT Yang Dibiayai Dana APBN ;

a. UPT Wilayah Palakka

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 4 | Org |
| • Petugas Pintu Air | sebanyak | 26 | Org |
| • Petugas Saluran | sebanyak | 19 | Org |

b. UPT Wilayah Sanrego

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 5 | Org |
| • Petugas Pintu Air | sebanyak | 26 | Org |
| • Petugas Saluran | sebanyak | 31 | Org |

c. UPT Wilayah Ponre-Ponre

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 2 | Org |
| • Petugas Pintu Air | sebanyak | 23 | Org |
| • Petugas Saluran | sebanyak | 18 | Org |

d. UPT Wilayah Pattiro

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 3 | Org |
| • Petugas Pintu Air | sebanyak | 19 | Org |
| • Petugas Saluran | sebanyak | 17 | Org |

2. Tenaga UPT Yang Dibiayai Dana APBD ;

a. UPT Wilayah Pattiro, Bengo, Unja, Wollangi dan Palakka

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----|-----|
| • Tenaga Pengolahan Data | sebanyak | 9 | Org |
| • Petugas Pintu Air dan POB | sebanyak | 22 | Org |
| • Urusan Operasi | sebanyak | 5 | Org |
| • Urusan Pemeliharaan | sebanyak | 3 | Org |

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Inventarisasi Aset)

Dalam melaksanakan tugas rutin sehari-hari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone ditunjang dengan Sarana dan Prasarana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Bone sesuai Tabel 2.1. Dalam melaksanakan pelayanan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga mengelola prasarana dan sarana sumber daya air di Kabupaten Bone, yang antara lain sebagai berikut:

1. Sungai dan Saluran Pembuang

Sungai di Kabupaten Bone yang sudah pernah tersentuh program kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Bone sebanyak 244 ruas sungai dari 268 ruas sungai yang telah terdata oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Adapun saluran pembuang yang telah tersentuh anggaran APBD Kabupaten Bone sebanyak 37 ruas saluran pembuang, baik yang ada di dalam kawasan perkotaan Watampone maupun di luar perkotaan. Selengkapnya data sungai dan saluran pembuang yang telah ter-cover oleh dana APBD Kabupaten Bone disajikan dalam Tabel 2.2.

2. Embung

Embung di Kabupaten Bone yang sudah pernah tersentuh program kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Bone sebanyak 129 unit embung dari 172 unit embung yang telah terdata oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone yang selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.3.

3. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bone sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, berjumlah 224 DI, yang selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Bone

| No. Urut | Nama Barang/Jenis Barang | Merk/Type | Tahun Pembelian | Kondisi | Jumlah Unit |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sepeda Motor | Suzuki Smash / FK.110 SD K6 | 2006 | KB | 1 |
| 2 | Pick Up | Daihatsu Grand Max PU AC.PS / Pick Up | 2013 | B | 1 |
| 3 | Sepeda Motor | Suzuki / Suzuki-FK 110 SCD | 2007 | KB | 1 |
| 4 | Sepeda Motor | Kawasaki / LX150C (KLX 150 S) | 2013 | B | 1 |
| 5 | Sepeda Motor | Kawasaki / LX150 C (KLX 150 S) | 2013 | B | 1 |
| 6 | Sepeda Motor | Kawasaki / KLX 150 | 2014 | B | 1 |
| 7 | Mobil | Ford Ranger | 2007 | B | 1 |
| 8 | Sepeda Motor | Kawasaki / KLX 150 | 2017 | B | 1 |
| 9 | Sepeda Motor | Kawasaki / KLX 150 | 2017 | B | 1 |
| 10 | Sepeda Motor | Kawasaki / KLX 150 | 2017 | B | 1 |
| 11 | Mobil | Toyota / Kijang innova | 2017 | B | 1 |
| 12 | Sepeda Motor | Yamaha MX King | 2018 | B | 1 |
| 13 | Sepeda Motor | Yamaha MX King | 2018 | B | 1 |
| 14 | Filling Besi/Metal | Brother / 4 Laci | 2008 | B | 1 |
| 15 | P.C Unit/ Komputer PC | Lenovo | 2013 | B | 1 |
| 16 | Lemari Besi | Brothet | 2015 | B | 1 |
| 17 | P.C Unit/ Komputer PC | Lenovo | 2015 | B | 1 |
| 18 | Printer | Epson | 2015 | B | 1 |
| 19 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | | 2015 | B | 1 |
| 20 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | | 2015 | B | 1 |
| 21 | P.C Unit/Komputer PC | | 2017 | B | 5 |
| 22 | Laptop Acer | | 2017 | B | 7 |
| 23 | Printer | | 2017 | B | 4 |
| 24 | Meja Kerja | | 2017 | B | 5 |
| 25 | Kursi Kerja | | 2017 | B | 5 |
| 26 | Kursi Rapat | | 2017 | B | 20 |
| 27 | Mesin Tik | | 2017 | B | 1 |
| 28 | Printer Pita | | 2017 | B | 1 |
| 29 | Printer Portable | | 2017 | B | 1 |
| 30 | Proyektor | | 2017 | B | 1 |
| 31 | G P S | Garmin Montana | 2017 | B | 2 |
| 32 | Lemari Arsip | | 2017 | B | 4 |
| 33 | AC 1 PK | | 2017 | B | 4 |
| 34 | AC 1/2 PK | | 2017 | B | 3 |
| 35 | Meja Kerja | | 2017 | B | 1 |
| 36 | Meja Rapat | | 2017 | B | 12 |
| 37 | Meja Rapat | | 2017 | B | 1 |
| 38 | Kursi Kerja | | 2017 | B | 1 |
| 39 | Kursi Rapat | | 2017 | B | 6 |
| 40 | Kursi Rapat | | 2017 | B | 30 |
| 41 | Meja Kerja | | 2018 | B | 6 |
| 42 | Kursi Kerja | | 2018 | B | 6 |
| 43 | Lemari Arsip | | 2018 | B | 6 |
| 44 | Lemari FILING Cabinet | | 2018 | B | 4 |
| 45 | P.C Unit/Komputer PC | | 2018 | B | 2 |
| 46 | Printer | | 2018 | B | 2 |
| 47 | AC 1/2 PK | | 2018 | B | 2 |
| 48 | Kamera | | 2018 | B | 1 |
| 49 | Podium | | 2018 | B | 1 |

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PSDA. 2018.

Tabel 2.2. Sungai Dan Saluran Pembuang Yang Telah Tersentuh Oleh Dana APBD Kabupaten Bone

| No. | Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar Permukaan (m) | Lebar Dasar (m) | Kedalaman (m) | Debit Maksimum (m3/detik) | Debit Minimum (m3/detik) | Letak | |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Desa | Kecamatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RUAS SUNGAI | | | | | | | | | |
| 1 | S. PALAKKA | 20 | 55 | 50 | 3 | 3.394 | 1.000 | Lintas Kecamatan | |
| 2 | S. BIRU | 9 | 5 | 3.5 | 1.5 | 10.392 | 0.611 | Kelurahan Biru | Tanete Riattang |
| 3 | S. CALOKO | 9 | 5 | 4 | 1.5 | 0.447 | 0.168 | Kelurahan Bukaka | Tanete Riattang |
| 4 | S. MALLAJENA | 2.7 | 5.5 | 3 | 1.2 | 0.546 | 0.209 | Kelurahan Bukaka | Tanete Riattang Barat |
| 5 | S. PALLENGORENG | 3.5 | 6 | 5 | 1.5 | 0.447 | 0.168 | Kelurahan Majang | Tanete Riattang Barat |
| 6 | S. PANYULA | 2 | 8 | 7 | 1.5 | 0.947 | 0.768 | Kelurahan Panyula | Tanete Riattang |
| 7 | S. TORO | 3 | 5 | 4 | 1.5 | 1.447 | 0.568 | Kelurahan Toro | Tanete Riattang Barat |
| 8 | S. PAPPOLO | 7 | 6 | 5 | 1.5 | 0.447 | 0.168 | Kelurahan Pappolo | Tanete Riattang |
| 9 | S. MADURI | 5.5 | 6.5 | 5 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | Desa Maduri | Palakka, Barebbo |
| 10 | S. COMPONGNGE | 4.5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.447 | 0.168 | Desa Componge | Awangpone |
| 11 | S. JALING | 17 | 5.5 | 3 | 1.2 | 0.546 | 0.209 | Desa Jaling | Awangpone |
| 12 | S. UNRA | 2.5 | 5 | 4.5 | 1 | 0.036 | 0.025 | Desa Unra | Awangpone |
| 13 | S. AKO BANGE | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 0.443 | 0.168 | Desa Liliriattang | Lappariaja |
| 14 | S. ANGASANGNGE | 12 | 5 | 3 | 1 | 0.847 | 0.763 | Desa Liliriattang | Lappariaja |
| 15 | S. ASSIRAJANGNGE | 3 | 5 | 4 | 1.5 | 1.447 | 0.568 | Desa Mattampa Walie | Lappariaja |
| 16 | S. BALUBU | 7 | 7 | 5 | 1.3 | 1.154 | 0.135 | Desa Mattirowalie | Bengo |
| 17 | S. BANA | 7 | 6.7 | 5 | 1.3 | 1.144 | 0.13 | Desa Bana | Lappariaja |
| 18 | S. BARUGAE | 5 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.474 | 0.422 | Desa Barugae | Lamuru |
| 19 | S. BATU LAPPA | 3 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0.474 | 0.445 | Desa Batu Lappa | Lappariaja |
| 20 | S. BATU PUTIH | 4 | 6 | 4 | 1.3 | 0.546 | 0.422 | Desa Batu Putih | Tellu Limpoe |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| 21 | S. BATUA | 3.5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.434 | 0.342 | Desa Sijelling | Tellu Siattinge |
| 22 | S. BENGO | 13 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.544 | 0.324 | Desa Bengo | Bengo |
| 23 | S. BONTU MASUNGGU | 3.5 | 6.7 | 5 | 1.3 | 1.144 | 0.137 | Desa Bontu Masunggu | Tellu Limpoe |
| 24 | S. BULO | 5.5 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.476 | 0.422 | Desa Mattampa Walie | Lappariaja |
| 25 | S. BULU TUNGKE | 4 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0.474 | 0.445 | Desa Bulu Tungke | Lappariaja |
| 26 | S. CALIMPONG | 2 | 6 | 4 | 1.3 | 0.567 | 0.476 | Desa Tenri Pakkua | Lappariaja |
| 27 | S. ELLE | 7 | 5 | 4 | 1.2 | 0.459 | 0.399 | Desa Bontu Masunggu | Tellu Limpoe |
| 28 | S. INRU | 2 | 6 | 5 | 1.2 | 0.449 | 0.122 | Desa Tungke | Bengo |
| 29 | S. JEMPO | 4 | 6 | 4 | 1.3 | 0.546 | 0.422 | Desa Mattampa Walie | Lappariaja |
| 30 | S. KALOBBAE | 3.5 | 5 | 4 | 1.3 | 0.692 | 0.758 | Desa Tenri Pakkua | Lappariaja |
| 31 | S. LABONE | 4 | 6 | 4 | 1.3 | 0.546 | 0.422 | Desa Tenri Pakkua | Lappariaja |
| 32 | S. LAJANG-LAJANG | 3 | 5.5 | 5 | 1.2 | 0.465 | 0.124 | Desa Sengeng Palie | Lappariaja |
| 33 | S. LAPAWOE | 11 | 5 | 3 | 1 | 0.847 | 0.763 | Desa Sengeng Palie | Tellu Limpoe, Lappariaja |
| 34 | S. LAPINCE | 11 | 5 | 4 | 1.5 | 1.447 | 0.568 | Desa Mattampa Bulu | Lamuru |
| 35 | S. LAPP BEDDA | 3.5 | 4 | 3 | 1.5 | 1.767 | 0.591 | Desa Mamminasae | Lamuru |
| 36 | S. LAPP JUPENG | 3.5 | 5 | 4 | 1.8 | 0.255 | 0.156 | Desa Bengo | Bengo |
| 37 | S. LAPP TALLE | 3.5 | 4 | 3 | 1.5 | 1.761 | 0.594 | Mattampa Walie | Lappariaja |
| 38 | S. LASINA | 3.5 | 6 | 5 | 1.3 | 0.244 | 0.124 | Desa Lalebata | Lamuru |
| 39 | S. LEKO BALLO | 5 | 4.5 | 4 | 1.2 | 0.215 | 0.126 | Kelurahan Lalebbata | Lamuru |
| 40 | S. LEMPANG | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.767 | 0.591 | Desa Tonronge | Lappariaja |
| 41 | S. LIBUKANGNGE | 3.5 | 5 | 4 | 1.8 | 0.255 | 0.156 | Desa Mattampa bulu | Lamuru |
| 42 | S. LONRU | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 1.761 | 0.594 | Desa Mattiro Walie | Bengo |
| 43 | S. LOPPA | 4 | 6 | 5 | 1.3 | 0.244 | 0.124 | Desa Polewali | Tellu Siattinge |
| 44 | S. MALAKA I | 3 | 7 | 5 | 1.5 | 0.395 | 0.114 | Desa Mattaropuli | Bengo |
| 45 | S. MALAKA II | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 1.761 | 0.591 | Desa Mattaropuli | Bengo |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------------|------|-----|---|-----|-------|-------|----------------------|--------------|
| 46 | S. MAMMINASAE | 3 | 5 | 4 | 1.8 | 0.255 | 0.156 | Desa Mamminasae | Lamuru |
| 47 | S. MASSAPPAE | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 1.761 | 0.594 | Desa Mattampa Bulu | Lamuru |
| 48 | S. MONCONG | 3 | 6 | 5 | 1.3 | 0.239 | 0.124 | Desa Mattampa Walie | Lappariaja |
| 49 | S. MUTIARA | 4.5 | 5.5 | 5 | 1.2 | 0.465 | 0.134 | Desa Mutiara | Lamuru |
| 50 | S. NAGAE | 2.5 | 5.5 | 5 | 1.3 | 0.295 | 0.117 | Desa Pattukku Limpoe | Tellu Limpoe |
| 51 | S. PADANG LAMPE | 4 | 5.5 | 4 | 1.2 | 0.223 | 0.122 | Desa Tenri Pakkua | Lappariaja |
| 52 | S. PADANG TENGNGAE | 4 | 8 | 7 | 2 | 1.465 | 0.834 | Desa Tungke | Bengo |
| 53 | S. PADANGLOANG | 5.5 | 5.5 | 5 | 1.3 | 0.295 | 0.117 | Desa Mattampa Bulu | Lamuru |
| 54 | S. PARIGI | 2.5 | 5.5 | 5 | 1.3 | 0.247 | 0.157 | Desa Sengeng Palie | Lappariaja |
| 55 | S. PASSAPPARENG | 3 | 5 | 4 | 1.2 | 0.223 | 0.122 | Desa Massenreng Pulu | Lamuru |
| 56 | S. PISING | 3 | 5.5 | 5 | 1.2 | 0.465 | 0.134 | Desa Sengeng Palie | Lamuru |
| 57 | S. PONRO LIBURENG | 4 | 5 | 4 | 1.2 | 0.223 | 0.122 | Desa Selli | Bengo |
| 58 | S. RABUA | 4 | 5.5 | 4 | 1.2 | 0.227 | 0.129 | Desa Tondong Bua | Tellu Limpoe |
| 59 | S. RAJA | 2.5 | 8 | 7 | 2 | 1.465 | 0.834 | Desa Mattampawalie | Lappariaja |
| 60 | S. SELLI | 3.5 | 5.5 | 4 | 1.2 | 0.226 | 0.125 | Desa Selli | Bengo |
| 61 | S. SENGENGPALE | 2.5 | 5.5 | 5 | 1.3 | 0.278 | 0.149 | Desa Sengeng Palie | Lappariaja |
| 62 | S. SOLORENG | 11.5 | 7 | 6 | 1.5 | 0.466 | 0.267 | Desa Lalebata | Lamuru |
| 63 | S. TALAGA | 4 | 5.5 | 5 | 1.3 | 0.395 | 0.217 | Desa Sengeng Palie | Lappariaja |
| 64 | S. TAPONG | 4.5 | 5.5 | 5 | 1.3 | 0.247 | 0.157 | Desa Tapong | Tellu Limpoe |
| 65 | S. TAROGI | 3 | 5 | 4 | 1.2 | 0.323 | 0.122 | Desa Sengeng Palie | Lappariaja |
| 66 | S. TELLANGKERE | 5 | 5.5 | 5 | 1.2 | 0.435 | 0.134 | Desa Tellangkere | Tellu Limpoe |
| 67 | S. TELLU LIMPOE | 3.5 | 5 | 4 | 1.2 | 0.293 | 0.122 | Desa Tellu Limpoe | Tellu Limpoe |
| 68 | S. TELLU LIPUE | 2.5 | 6 | 4 | 1.2 | 0.366 | 0.129 | Desa Mattampa Bulu | Lamuru |
| 69 | S. TEPPAE | 7 | 8 | 7 | 2 | 1.465 | 0.834 | Desa Pattukku Limpoe | Lappariaja |
| 70 | S. TOBEMPA | 3 | 5.5 | 4 | 1.2 | 1.226 | 0.125 | Desa Mattampa Walie | Lappariaja |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|----------------------|------------------|
| 71 | S. TOMPO BARUTTUNG | 2.5 | 7 | 6 | 1.5 | 1.008 | 0.988 | Desa Pada Elo | Lamuru |
| 72 | S. TONDONG BUA | 3.5 | 5 | 4 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa Tondong Bua | Tellu Limpoe |
| 73 | S. TONRONGGE | 5 | 7 | 6 | 1.5 | 1.108 | 0.912 | Desa Tonronge | Lappariaja |
| 74 | S. TORETTE | 3 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.117 | 0.459 | Desa Mattampa Walie | Lamuru |
| 75 | S. TUNGKE | 3 | 6 | 4.5 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa Tungke | Bengo |
| 76 | S. ULAWENG | 2.5 | 5 | 4 | 1.3 | 0.337 | 0.105 | Desa Tenri Pakkua | Lappariaja |
| 77 | S. WALIMPONG | 4 | 7 | 6 | 1.5 | 1.108 | 0.912 | Desa Walimpong | Bengo |
| 78 | S. LOMPO | 8 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.117 | 0.459 | Desa Sengeng Palie | Lamuru |
| 79 | S. CAREKKO | 7.3 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Kelurahan Lalebbata | Lamuru |
| 80 | S. LABOJO | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 0.337 | 0.105 | Desa Sengeng Palie | Lamuru |
| 81 | S. WAEKECCE'E | 5 | 8 | 6 | 1.5 | 2.955 | 1.743 | Desa Waekecce'e | Lappariaja |
| 82 | S. PATTUKU LIMPOE | 3.5 | 7 | 6 | 1.3 | 1.356 | 0.876 | Desa Pattukku Limpoe | Lappariaja |
| 83 | S. AJASSAO | 2.5 | 5 | 4 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa Baringeng | Libureng |
| 84 | S. BARINGENG | 3.5 | 7 | 6 | 1.5 | 1.108 | 0.912 | Desa Baringeng | Libureng |
| 85 | S. KALUPPANG | 7.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.117 | 0.459 | Desa Swadaya | Libureng |
| 86 | S. KANRUNG | 3.5 | 6 | 4.5 | 1.3 | 0.045 | 0.555 | Desa Mattirowalie | Libureng |
| 87 | S. LAPPA DATA | 2 | 5 | 4 | 1.3 | 0.337 | 0.165 | Desa Baringeng | Libureng |
| 88 | S. MALLINRUNG | 4.5 | 8 | 6 | 2 | 2.575 | 1.743 | Desa Mallinrung | Libureng |
| 89 | S. SAMAENRE | 4.5 | 5 | 4 | 1.5 | 1.575 | 0.743 | Desa Samaenre | Libureng |
| 90 | S. TINCO | 3.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.117 | 0.459 | Desa Tinco | Libureng |
| 91 | S. TODDANG LEMPANG | 5 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa Tompo Bulu | Libureng |
| 92 | S. TOMPO BULU | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 0.098 | 0.054 | Desa Tompo Bulu | Libureng |
| 93 | S. PATTIRO | 30 | 8 | 5 | 2.9 | 2.555 | 0.743 | Desa Pattiro | Barebbo, Sibulue |
| 94 | S. DEKKO | 3.5 | 7 | 6 | 1.7 | 1.333 | 0.889 | Desa mappesangka | Ponre |
| 95 | S. JERAE | 3.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.117 | 0.459 | Desa Pattimpa | Ponre |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|----------------------|---------------|
| 96 | S. KAROPPA | 7.5 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa turu adae | Ponre |
| 97 | S. LERANG | 5 | 7 | 6 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa Abbumpungeng | Cina |
| 98 | S. LOMPU | 2 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.117 | 0.459 | Desa Lompu | Cina |
| 99 | S. PALACARI | 3 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa Salebba | Ponre |
| 100 | S. PANGISORENG | 6 | 10 | 8 | 1.8 | 0.086 | 0.054 | Desa Abbumpungeng | Cina |
| 101 | S. PATIMPA | 4.5 | 6.5 | 6 | 1.3 | 0.095 | 0.051 | Desa Pattimpa | Ponre |
| 102 | S. PATIONGI | 3 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.117 | 0.459 | Desa Cinenning | Ponre |
| 103 | S. POLEONRO | 4 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa Poleonro | Ponre |
| 104 | S. SABILA | 2 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.117 | 0.459 | Desa Padang Loang | Cina |
| 105 | S. SOGA | 5.5 | 5 | 4.5 | 1.3 | 0.097 | 0.05 | Desa Kanco | Cina |
| 106 | S. TADDAGAE | 3.5 | 7 | 5 | 1.4 | 0.096 | 0.054 | Desa Walenreng | Cina |
| 107 | S. TELLU BOCCOE | 3 | 5.5 | 4 | 1.3 | 0.096 | 0.059 | Desa Tellu Boccoe | Ponre |
| 108 | S. WARU-WARU | 15 | 5 | 4 | 1.5 | 0.657 | 0.376 | Desa Kadai | Mare |
| 109 | S. JUJI | 20 | 6 | 4.5 | 1.3 | 0.155 | 0.098 | Tunreng Tellue | Sibulue, Mare |
| 110 | S. MALLUSETASI | 4 | 7 | 5 | 1.4 | 0.096 | 0.054 | Desa Mallusetasi | Sibulue |
| 111 | S. PAKKASALO | 5 | 10 | 8 | 2 | 1.448 | 1.058 | Desa Pakkasalo | Sibulue |
| 112 | S. MACCOPE | 15 | 5 | 4 | 1.5 | 0.096 | 0.053 | Desa Massenreng Pulu | Kec. Sibulue |
| 113 | S. CINNONG | 4 | 5.5 | 5 | 1.3 | 1.443 | 1.054 | Desa Cinnong | Barebbo |
| 114 | S. KAJU | 3.5 | 5 | 4 | 1.2 | 0.096 | 0.053 | Desa Kaju | Sibulue |
| 115 | S. MASUMPU | 4 | 6 | 5 | 1.3 | 1.493 | 1.154 | Desa Kadai | Mare |
| 116 | S. BUARANGE | 3.5 | 5 | 4 | 1.4 | 0.988 | 0.677 | Desa Manajeng | Sibulue |
| 117 | S. LEWA | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.656 | 0.588 | Desa Manajeng | Sibulue |
| 118 | S. BULIE | 10 | 4.5 | 4 | 1.5 | 0.756 | 0.548 | Desa Muara | Tonra |
| 119 | S. AMMEGGE | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 0.976 | 0.593 | Desa Mallusetasi | Sibulue |
| 120 | S. CALLEPAE | 7 | 5 | 4 | 1.2 | 0.655 | 0.322 | Desa Watu | Barebbo |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|----------------|------|-----|-----|------|-------|-------|----------------------------|---------------|
| 121 | S. BULU-BULU | 14 | 21 | 11 | 1 | 2.4 | 1.54 | Desa Bulu-Bulu | Tonra |
| 122 | S. GONA | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 2.001 | 0.987 | Desa Gona | Kajuara |
| 123 | S. KALERO | 8 | 5 | 4 | 1.3 | 1.542 | 0.941 | Desa Kalero | Kajuara |
| 124 | S. LAPUTTENG | 3.5 | 5 | 4 | 1.3 | 0.938 | 0.256 | Desa Libureng | Tonra |
| 125 | S. LONRONG | 3.5 | 5 | 4 | 1.2 | 0.972 | 0.521 | Desa Pattimpa | Kajuara |
| 126 | S. MANNERA | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.988 | 0.677 | Desa Manner | Salomekko |
| 127 | S. RAPPA | 3 | 5 | 4 | 1.2 | 0.972 | 0.521 | Desa Rappa | Tonra |
| 128 | S. SALOMEKKO | 15 | 6 | 5 | 1.5 | 1.567 | 1.098 | Biccoing, Manner | Salomekko |
| 129 | S. TOBUNNE | 12 | 5 | 4 | 1.2 | 0.979 | 0.529 | Desa Padaelo | Kajuara |
| 130 | S. PAJALELE | 5.75 | 6 | 3 | 2 | 0.988 | 0.677 | Kelurahan Awang Tangka | Kajuara |
| 131 | S. MAPPATOBA | 7.5 | 10 | 8 | 1.5 | 1.465 | 1.055 | Desa Mappatoba | Salomekko |
| 132 | S. WARU | 11 | 5 | 4 | 1.5 | 0.666 | 0.275 | Desa Waru | Tonra |
| 133 | S. BARUTTUNG | 5.5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.665 | 0.545 | Desa Bicoing | Tonra |
| 134 | S. TELLONGENG | 4 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0.765 | 0.559 | Desa Tellongeng | Mare |
| 135 | S. CENRANA | 5.5 | 4.5 | 4 | 1.3 | 0.764 | 0.553 | Desa Tellongeng | Mare |
| 136 | S. DATA | 3.5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.699 | 0.675 | Desa Data | Mare |
| 137 | S. MARE | 70 | 4 | 3 | 1.0 | 0.885 | 0.455 | Desa Kadai Dusun Bakke Aju | Mare |
| 138 | S. BARANG | 4 | 4 | 3.5 | 1.00 | 0.097 | 0.067 | Desa Cenrana | Kahu |
| 139 | S. BARUTTUNGGE | 5 | 6 | 4 | 1.3 | 0.979 | 0.529 | Desa Patongi | Patimpeng |
| 140 | S. KELLE | 10 | 4 | 3.5 | 1.00 | 0.097 | 0.067 | Desa Bulu Tanah | Kahu, Kajuara |
| 141 | S. LAPPA PORO | 4 | 4 | 3.5 | 1.00 | 0.097 | 0.067 | Desa Mattiro Walie | Bontocani |
| 142 | S. MAGGENRANG | 3 | 6 | 4.5 | 1.5 | 0.966 | 0.526 | Desa Maggenrang | Kahu |
| 143 | S. MARADDA | 7 | 4 | 3.5 | 1.00 | 0.097 | 0.067 | Desa Biru | Kahu |
| 144 | S. MAROANGING | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.50 | 0.197 | 0.069 | Desa Talabangi | Patimpeng |
| 145 | S. MATAJANG | 3 | 4.5 | 3.5 | 1.50 | 0.194 | 0.046 | Desa Matajang | Kahu |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------------------|------------------------------|
| 146 | S. PALATTAE | 13 | 6 | 5 | 2 | 0.966 | 0.526 | Palattae | Kahu |
| 147 | S. PAMMUSURENG | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.057 | 0.034 | Kelurahan Kahu | Bontocani |
| 148 | S. SANREGO | 18 | 7 | 5 | 1.3 | 7.536 | 2.718 | Desa Sanrego | Kahu, Libureng, Bontocani |
| 149 | S. TALABANGI I | 2.5 | 8 | 7 | 1.5 | 2.567 | 1.444 | Desa Talabangi | Patimpeng |
| 150 | S. TALABANGI II | 2 | 8 | 7 | 1.5 | 2.545 | 1.443 | Desa Talabangi | Patimpeng |
| 151 | S. TALABANGI III | 2 | 7 | 5 | 1.3 | 2.211 | 1.342 | Desa Talabangi | Patimpeng |
| 152 | S. TANGKULU | 3.5 | 6 | 3 | 1 | 0.057 | 0.034 | Desa Watang Cani | Bontocani |
| 153 | S. TOLI-TOLI | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.053 | 0.025 | Desa Palakka | Kahu |
| 154 | S. TOLI U | 5 | 7 | 5 | 1.3 | 2.211 | 1.342 | Desa Cammilo | Kahu |
| 155 | S. WATANG CANI | 4 | 6 | 3 | 1 | 0.057 | 0.034 | Desa Watang Cani | Bontocani |
| 156 | S. BANA | 5.5 | 4 | 3 | 1 | 0.053 | 0.025 | Desa Bana | Lappariaja |
| 157 | S. BONTO JAI | 6 | 5 | 4 | 1.4 | 0.805 | 0.755 | Desa Bonto Jai | Bontocani |
| 158 | S. BULU SIRUA | 4.5 | 7 | 5 | 1.3 | 2.211 | 1.342 | Desa Bulu Sirua | Bontocani |
| 159 | S. ERE CINNONG | 4 | 6 | 3 | 1 | 0.057 | 0.034 | Desa Ere cinnong | Bontocani |
| 160 | S. LAMONCONG | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.053 | 0.025 | Desa Lamoncong | Bontocani |
| 161 | S. LANGI | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0.053 | 0.025 | Desa Langi | Bontocani |
| 162 | S. PERANGENG | 3.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0.805 | 0.555 | Desa Lebonge | Cenrana |
| 163 | S. AJJALIRENG | 2.5 | 6.8 | 6 | 1.5 | 0.887 | 0.567 | Desa Ajjalireng | Tellu Siattinge |
| 164 | S. BOTTO | 3.5 | 4 | 3 | 1.2 | 0.767 | 0.577 | Desa Padaidi | Tellu Siattinge |
| 165 | S. CENRANAE | 50 | 40 | 30 | 6 | 7.536 | 2.718 | Lintas Kecamatan | |
| 166 | S. DEWATAE | 2.5 | 3.5 | 3 | 1 | 0.667 | 0.577 | Desa Palongki | Tellu Siattinge |
| 167 | S. IPIE | 4 | 3 | 2.5 | 1 | 0.755 | 0.577 | Desa Palongki | Tellu Siattinge |
| 168 | S. JAMPU | 2 | 3 | 2.5 | 1.1 | 0.667 | 0.577 | Desa Sijelling | Tellu Siattinge |
| 169 | S. JOMPENG | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 1.665 | 0.998 | Desa Sijelling | Tellusiattinge |
| 170 | S. LACCORI | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 0.965 | 0.898 | Desa Laccori | Dua Boccoe |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|---------------------|------------------|
| 171 | S. OPO | 3 | 20 | 18 | 4 | 1.965 | 0.898 | Pompanua Riattang | Ajangale |
| 172 | S. PADA IDI | 4.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0.805 | 0.555 | Desa Pada Idi | Tellu Siattinge |
| 173 | S. PALONGKI | 3 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0.905 | 0.655 | Desa Palongki | Tellu Siattinge |
| 174 | S. PERANGENG | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 0.985 | 0.898 | Desa Lebonge | Cenrana |
| 175 | S. SIJELLING | 6 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0.905 | 0.655 | Desa Sijelling | Tellu Siattinge |
| 176 | S. TAJONG | 5.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 778 | 0.655 | Desa Tajong | Tellu Siattinge |
| 177 | S. UNYI | 17 | 20 | 18 | 4 | 0.566 | 0.566 | Desa Tempe | Dua Boccoe |
| 178 | S. PATTIRO | 7 | 6 | 5 | 1.5 | 10.392 | 0.611 | Desa Pattiro | Barebbo, Sibulue |
| 179 | S. ULO – ULO | 9 | 12 | 10 | 2 | 1.965 | 0.898 | Desa Componge | Tellu Siattinge |
| 180 | S. CIROWALI | 4.5 | 5.5 | 5 | 1.5 | 0.096 | 0.03 | Desa Cirowali | Barebbo |
| 181 | S. BUTTU | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.492 | 0.405 | Kec. Ulaweng | |
| 182 | S. CAKKULO | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.515 | 0.336 | Desa Cakkulo | Amali |
| 183 | S. COPPO MELLE | 3.5 | 5 | 4 | 1.5 | 0.492 | 0.405 | Desa tocinngong | Amali |
| 184 | S. GALUNG I | 4 | 5.5 | 4 | 1.2 | 0.472 | 0.224 | Desa Mulamenree | Ulaweng |
| 185 | S. GALUNG II | 3.5 | 5.5 | 4 | 1.2 | 0.045 | 0.032 | Desa Galung | Ulaweng |
| 186 | S. GALUNG III | 2 | 5.5 | 4 | 1.2 | 0.045 | 0.032 | Desa Galung | Ulaweng |
| 187 | S. KANNANGO | 4 | 6 | 5 | 1.2 | 0.045 | 0.032 | Desa Galung | Ulaweng |
| 188 | S. KATAPANG | 2.5 | 5 | 4 | 1.2 | 0.078 | 0.038 | Desa ulaweng | Amali |
| 189 | S. PANAMPUNG | 3.5 | 5.5 | 4 | 1.2 | 0.045 | 0.032 | Desa Timusu | Ulaweng |
| 190 | S. TABBE WALIE | 3.5 | 5.5 | 5 | 1.2 | 0.078 | 0.038 | Desa Cani Sidenreng | Ulaweng |
| 191 | S. WALENRENG | 2.5 | 7 | 5 | 1.3 | 1.199 | 0.558 | Desa Walenreng | Ulaweng |
| 192 | S. KATAPANG | 1.5 | 5 | 4 | 1.3 | 0.078 | 0.038 | Desa ulaweng | Amali |
| 193 | S. LALIDDONG | 3 | 5.5 | 5 | 1.2 | 0.078 | 0.038 | Desa Kajaolaliddong | Barebbo |
| 194 | S. TEPPU TAE | 4 | 5.5 | 4 | 1.3 | 0.841 | 0.59 | Desa teamusu | Ulaweng |
| 195 | S. MELLE | 3.5 | 10 | 8 | 2.1 | 0.23 | 0.074 | Desa Melle | Palakka |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------------------|-----------------|
| 196 | S. MICO | 7 | 6 | 5 | 1.3 | 1.193 | 0.521 | Pattimpa | Ponre |
| 197 | S. MINRALENG | 3 | 5 | 4 | 2 | 0.095 | 0.054 | Desa Ureng | Palakka |
| 198 | S. TANETE BUANG | 3 | 5.4 | 5 | 1.2 | 0.098 | 0.042 | Desa Matanete Bua | Palakka |
| 199 | S. CELLIE | 3 | 5 | 4 | 1.5 | 0.098 | 0.042 | Desa Ureng | Palakka |
| 200 | S. SALO TELLUE | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 0.098 | 0.042 | Desa Watu | Barebbo |
| 201 | S. WATU | 4 | 4.5 | 4 | 1.3 | 0.098 | 0.042 | Desa Watu | Barebbo |
| 202 | S. BAKKE | 3.5 | 5 | 4 | 1.2 | 0.098 | 0.042 | Desa Kajaolaliddong | Barebbo |
| 203 | S. KAMPUNO | 5.5 | 3.3 | 3 | 1.5 | 0.312 | 0.231 | Desa Kampuno | Barebbo |
| 204 | S. PATTUKU | 5.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.035 | 0.995 | Desa Pattukku | Bontocani |
| 205 | S. LAPUSE | 2 | 5.5 | 5 | 1.2 | 0.663 | 0.474 | Desa Jaling | Awangpone |
| 206 | S. LANCA | 2.4 | 5.5 | 5 | 1.5 | 0.566 | 0.234 | Desa Lanca | Tellu Siattinge |
| 207 | S. PACCING | 2 | 6 | 5 | 1.5 | 0.059 | 0.059 | Desa Pacing | Awangpone |
| 208 | S. PONRE-PONRE | 2 | 5.5 | 5 | 1.2 | 0.384 | 0.384 | Desa Ponre-Ponre | Libureng |
| 209 | S. WESSA | 1.6 | 6.6 | 5 | 1.2 | 0.247 | 0.145 | Desa Lilirawang | Bengo |
| 210 | S. TODDANG JOMPI | 1 | 6.6 | 5 | 1.2 | 0.275 | 0.206 | Desa Lilirawang | Bengo |
| 211 | S. KALU | 1.5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0.121 | 0.103 | Desa Lilirawang | Bengo |
| 212 | S. COPPO BULU | 2 | 4 | 3 | 1.3 | 0.439 | 0.308 | Selli | Bengo |
| 213 | S. WOLLANGI | 2.5 | 6 | 4 | 1.5 | 0.094 | 0.068 | Desa Wollangi | Barebbo |
| 214 | S. PANYILI | 2 | 6 | 4.5 | 1.3 | 0.078 | 0.044 | Panyili | Palakka |
| 215 | S. CALIRUNG | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.05 | 0.031 | Desa Lampoko | Barebbo |
| 216 | S. TARETTA | 2.5 | 5 | 4 | 1 | 0.246 | 0.246 | Desa Taretta | Ajangale |
| 217 | S. ARASOE | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 0.566 | 0.234 | Desa Arasoe | Cina |
| 218 | S. KAWERANG | 3 | 7 | 3.5 | 1.2 | 0.312 | 0.231 | Desa Kawerang | Cina |
| 219 | S. HITEI | 5 | 6 | 5 | 1.5 | 1.546 | 0.088 | Desa Pitumpidange | Libureng |
| 220 | S. MANCIRI | 5 | 6 | 4 | 1 | 0.566 | 0.234 | Desa Manciri | Ajangale |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------------------------|-----|----|-----|------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| 221 | S. KALIBONG | 2 | 4 | 3 | 1.2 | 0.312 | 0.231 | Desa Kalibong | Cina, Sibulue |
| 222 | S. SUGIALE | 3 | 4 | 3 | 1.7 | 0.412 | 0.331 | Desa Sugiale | Sibulue |
| 223 | S. SEPPANGE DSN TAPPERE | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 0.502 | 0.431 | Desa Massenreng Pulu | Sibulue |
| 224 | S. APPAKKIRENG | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 0.072 | 0.031 | Pasaka | Sibulue |
| 225 | S. BAKKE AJU | 5 | 35 | 30 | 1.5 | 1.546 | 0.188 | Desa Kadaai | Kec. Mare |
| 226 | S. AMMEGGE | 2 | 5 | 4 | 1.5 | 0.702 | 0.431 | Desa Mallusetasi | Sibulue |
| 227 | S. MANGUNRENG | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.988 | 0.444 | Desa Sumaling | Kec. Mare |
| 228 | S. LAMPOKO | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 0.788 | 0.344 | Desa Lampoko | Barebbo |
| 229 | S. KIHAJAR | 1 | 4 | 3 | 1.35 | 0.056 | 0.03 | Kelurahan Biru | T. Riattang |
| 230 | S. TALUMAE | 2 | 7 | 5 | 1.5 | 0.703 | 0.437 | Kelurahan Bukaka | T. Riattang |
| 231 | S. WAETUO | 2 | 11 | 8 | 1.2 | 0.768 | 0.364 | Kelurahan Waetuo | Tanete Riattang Timur |
| 232 | S. NAGA ULENG | 0.5 | 6 | 4 | 1.5 | 0.056 | 0.03 | Desa Naga Uleng | Cina |
| 233 | S. TOCINA | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.052 | 0.031 | Desa Tocina | Dua Boccoe |
| 234 | S. POMPANUA RIATTANG | 2 | 7 | 5 | 3 | 2.877 | 1.988 | Kelurahan Pompanua Riattang | Ajangale |
| 235 | S. CABBENG | 1.5 | 3 | 2.7 | 1.3 | 0.056 | 0.03 | Desa pattiro | Dua Boccoe |
| 236 | S. ULOE | 3 | 8 | 5 | 2 | 0.768 | 0.364 | Desa Uloe | Dua Boccoe |
| 237 | S. LABESSI | 1.5 | 8 | 5 | 2 | 0.046 | 0.03 | Desa mattiro Bulu | Libureng |
| 238 | S. PALLA ELLENG | 1.4 | 7 | 5 | 3 | 2.877 | 1.988 | Ulaweng Riaja | Amali |
| 239 | S. PADDATU | 2.3 | 8 | 5 | 2.5 | 2.877 | 1.988 | Desa Ceppaga | Libureng |
| 240 | S. KASUMPURENG | 1.5 | 5 | 4 | 1.2 | 0.056 | 0.03 | Kelurahan Tanete | cina |
| 241 | S. TANETE HARAPAN | 1.5 | 8 | 7 | 1.1 | 0.051 | 0.029 | Kelurahan Tanete Harapan | Cina |
| 242 | S. UJUNG TANAH | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.091 | 0.079 | Desa Ujung Tanah | Mare |
| 243 | S. TANETE | 2 | 5 | 4 | 1.2 | 0.031 | 0.029 | Kelurahan Tanete Harapan | Cina |
| 244 | S. LAPANNING TABU | 2 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.058 | 0.039 | Kelurahan Waetuo | T. Riattang Timur |

Tabel 2. 2. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------|----------------------------------|-----|---|---|---|---|---|-------------------------|-----------------------|
| RUAS SALURAN PEMBUANG | | | | | | | | | |
| 1 | S. PEMBUANG WT. PADANG CENGNGA | 2 | - | - | - | - | - | Desa Wt. Padang Cengnga | Dua Boccoe |
| 2 | S. PEMBUANG JL. JEND. AHMAD YANI | 2 | - | - | - | - | - | Kelurahan jeppe'e | Tanete Riattang Barat |
| 3 | S. PEMBUANG KALIBONG | 2 | - | - | - | - | - | Desa Kalibong | Sibulue |
| 4 | S. PEMBUANG BARITO | 1.5 | - | - | - | - | - | Kelurahan manurunge | Tanete Riattang |
| 5 | S. PEMBUANG CALOKO | 2 | - | - | - | - | - | Kelurahan Walanae | Tanete Riattang |
| 6 | S. PEMBUANG COPPOLEANG | 1.9 | - | - | - | - | - | Kelurahan Watampone | Tanete Riattang |
| 7 | S. PEMBUANG BUKAKA | 2 | - | - | - | - | - | Kelurahan Bukaka | Tanete Riattang |
| 8 | S. PEMBUANG LING. BIRU | 2 | - | - | - | - | - | Kelurahan Biru | Tanete Riattang |
| 9 | S. PEMBUANG MANRUNGE | 1.5 | - | - | - | - | - | Kelurahan manurunge | Tanete Riattang |
| 10 | S. PEMBUANG LANGANCA | 1.5 | - | - | - | - | - | Desa Ulaweng Cinnong | Ulaweng |
| 11 | S. PEMBUANG MANNAGAE | 2 | - | - | - | - | - | Desa Padang Loang | Cina |
| 12 | S. PEMBUANG LING. CABALU | 1.5 | - | - | - | - | - | Kelurahan Mattirowalie | T. R. Barat |
| 13 | S. PEMBUANG BAREBBO | 2 | - | - | - | - | - | Desa Barebbo | Barebbo |
| 14 | S. PEMBUANG LING. BENE | 1.6 | - | - | - | - | - | Kelurahan Lonrae | T. R. Timur |
| 15 | S. PEMBUANG WELADO | 2 | - | - | - | - | - | Desa Welado | Ajangale |
| 16 | S. PEMBUANG LACOKKONG | 1.2 | - | - | - | - | - | Kelurahan Watampone | Tanete Riattang |
| 17 | S. PEMBUANG PEPABRI | 1.5 | - | - | - | - | - | Kelurahan Biru | Tanete Riattang |
| 18 | S. PEMBUANG TAWAROE | 1.5 | - | - | - | - | - | Desa Tawaroe | Dua Boccoe |
| 19 | S. PEMBUANG BATU TANRE | 2 | - | - | - | - | - | Desa Cakkeware | Cenrana |
| 20 | S. PEMBUANG PONCENG | 2 | - | - | - | - | - | Kelurahan Ta' | Tanete Riattang |
| 21 | S. PEMBUANG PALLIME | 2 | - | - | - | - | - | Desa Pallime | Cenrana |
| 22 | S PEMBUANG NAGA ULENG | 0.5 | - | - | - | - | - | Desa Naga Uleung | Cenrana |
| 23 | S. PEMBUANG MATTAROPULI | 1.4 | - | - | - | - | - | Desa Mattaropuli | Bengo |
| 24 | S. PEMBUANG RINJANI | 1.6 | - | - | - | - | - | Kelurahan Watampone | Tanete Riattang |
| 25 | S. PEMBUANG WAETUO | 2 | - | - | - | - | - | Desa Waetuo | T. R. Timur |

Tabel 2. 2. Lanjutan (selesai)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------------|-----|---|---|---|---|---|----------------------|-----------------|
| 26 | S. PEMBUANG WOLLANGI | 1.6 | - | - | - | - | - | Desa Kajaolaliddong | Barebbo |
| 27 | S. PEMBUANG PALAKKA | 1.9 | - | - | - | - | - | Desa Bulu Tempe | T. R. Barat |
| 28 | S. PEMBUANG KAMPUNG BARU | 2 | - | - | - | - | - | Kelurahan Ta' | Tanete Riattang |
| 29 | S. PEMBUANG MELLE-MAJANG | 2 | - | - | - | - | - | Desa Melle | Palakka |
| 30 | S. PEMBUANG TANAH TENGGAH | 1.5 | - | - | - | - | - | Desa Baringeng | Libureng |
| 31 | S. PEMBUANG POLRES | 2 | - | - | - | - | - | Kelurahan Tibojong | T. R. Timur |
| 32 | S. PEMBUANG KAWERANG | 1.5 | - | - | - | - | - | Desa Kawerang | Cina |
| 33 | S. PEMBUANG KAMPUNO | 2 | - | - | - | - | - | Desa Kampuno | Barebbo |
| 34 | S. PEMBUANG LAUJU | 1.7 | - | - | - | - | - | Desa Panyili | Palakka |
| 35 | S. PEMBUANG SANRANGEN | 1.5 | - | - | - | - | - | Desa Mattanete Buang | Palakka |
| 36 | S. PEMBUANG DUSUN PAO | 2 | - | - | - | - | - | Desa Tellu Boccoe | Mare |
| 37 | S. PEMBUANG TURUNGENG | 2 | - | - | - | - | - | Desa Sijelling | Tellu Siattinge |

Sumber : Bidang Sungai Danau dan Waduk. 2018.

Tabel 2.3. Embung Yang Telah Tersentuh Oleh Dana APBD Kabupaten Bone

| No. Urut | Nama Bangunan | Luas Areal (ha) | Lokasi | | Volume (m ³) |
|----------|----------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|
| | | | Desa | Kecamatan | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Embung Lalepo | 25 | Lalepo | Kahu | 0.040 |
| 2 | Embung Ciborong I | 25 | Lalepo | Kahu | 0.042 |
| 3 | Embung Tibbo | 50 | Lalepo | Kahu | 0.078 |
| 4 | Embung Ciborong II | 25 | Lalepo | Kahu | 0.042 |
| 5 | Embung Pao | 25 | Pasaka | Kahu | 0.045 |
| 6 | Embung Tohonge | 50 | Pasaka | Kahu | 0.078 |
| 7 | Embung Mattoanging | 70 | Cammilo | Kahu | 0.109 |
| 8 | Embung Cakkela | 25 | Cakkela | Kahu | 0.042 |
| 9 | Embung Linre | 70 | Matajang | Kahu | 0.110 |
| 10 | Embung Laeba | 25 | Matajang | Kahu | 0.041 |
| 11 | Embung Lacekkeng Asu | 25 | Matajang | Kahu | 0.043 |
| 12 | Embung Lebbe | 25 | Matajang | Kahu | 0.044 |
| 13 | Embung Kajonga I | 50 | Biru | Kahu | 0.079 |
| 14 | Embung Kajonga II | 25 | Biru | Kahu | 0.039 |
| 15 | Embung Matuju | 20 | Biru | Kahu | 0.033 |
| 16 | Embung Waeputtang | 25 | Bontopadang | Kahu | 0.045 |
| 17 | Embung Maradda | 50 | Bontopadang | Kahu | 0.078 |
| 18 | Embung Tibbo | 30 | Bontopadang | Kahu | 0.045 |
| 19 | Embung Paranie | 25 | Bontopadang | Kahu | 0.042 |
| 20 | Waduk Poppai | 200 | Sanrego | Kahu | 0.285 |
| 21 | Embung Balle I | 50 | Balle | Kahu | 0.080 |
| 22 | Embung Balle II | 25 | Balle | Kahu | 0.430 |
| 23 | Embung Aletenga | 30 | Labuaja | Kahu | 0.045 |
| 24 | Embung Maggerang | 100 | Maggenrang | Kahu | 0.141 |
| 25 | Embung Camilo | 30 | Camilo | Kahu | 0.470 |
| 26 | Embung Matajang II | 50 | Matajang | Kahu | 0.079 |
| 27 | Embung Tompongpatu | 25 | Tompongpatu | Kahu | 0.400 |
| 28 | Embung Mario I | 75 | Bontojai | Bontocani | 0.106 |
| 29 | Embung Mario II | 65 | Bontojai | Bontocani | 0.091 |
| 30 | Embung Ceppaga | 50 | Bana | Bontocani | 0.078 |

Tabel 2. 3. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|-----|----------------|------------|-------|
| 31 | Embung Paku | 35 | Bana | Bontocani | 0.049 |
| 32 | Embung Lalakke | 50 | Bulusirua | Bontocani | 0.080 |
| 33 | Embung Pemukiman | 40 | Poleonro | Libureng | 0.056 |
| 34 | Embung Wanuwawaru | 30 | Wanuwawaru | Libureng | 0.045 |
| 35 | Embung Labombo | 50 | Wanuwawaru | Libureng | 0.079 |
| 36 | Embung Laboccing | 30 | Tappale | Libureng | 0.047 |
| 37 | Embung Tappale | 50 | Tappale | Libureng | 0.080 |
| 38 | Embung Pitumpidangnge | 25 | Pitumpidangnge | Libureng | 0.040 |
| 39 | Embung Tompobulu | 20 | Tompobulu | Libureng | 0.035 |
| 40 | Embung Lappa Galung | 40 | Tompobulu | Libureng | 0.056 |
| 41 | Embung Polewali | 25 | Polewali | Libureng | 0.041 |
| 42 | Embung Laburasseng | 25 | Laburasseng | Libureng | 0.420 |
| 43 | Embung Mallinrung I | 50 | Mallinrung | Libureng | 0.080 |
| 44 | Embung Bulu Ulaweng | 50 | Bulu Ulaweng | Patimpeng | 0.081 |
| 45 | Embung Gattareng | 44 | Gattareng | Salomekko | 0.050 |
| 46 | Embung Manera | 50 | Manera | Salomekko | 0.078 |
| 47 | Embung Lonrong | 41 | Abbumpungeng | Kajuara | 0.058 |
| 48 | Embung Waekecce | 50 | Waekecce | Lappariaja | 0.081 |
| 49 | Embung Mattampawalie | 100 | Mattampawalie | Lappariaja | 0.142 |
| 50 | Embung Cangiloe | 50 | Mattampawalie | Lappariaja | 0.078 |
| 51 | Embung Cimellu | 45 | Tenri Pakkua | Lappariaja | 0.064 |
| 52 | Embung Bila-Bilae | 40 | Tonrongnge | Lappariaja | 0.056 |
| 53 | Embung Libukangnge | 50 | Tonrongnge | Lappariaja | 0.079 |
| 54 | Embung Tonrongnge | 45 | Tonrongnge | Lappariaja | 0.064 |
| 55 | Embung Talaga | 45 | Sengengpalie | Lappariaja | 0.065 |
| 56 | Embung Acicironge | 30 | Sengengpalie | Lappariaja | 0.047 |
| 57 | Embung Mappakkae | 45 | Sengengpalie | Lappariaja | 0.065 |
| 58 | Embung Bujung Cikke | 40 | Sengengpalie | Lappariaja | 0.055 |
| 59 | Embung Labaka | 40 | Sengengpalie | Lappariaja | 0.057 |
| 60 | Embung Lappa Majja | 22 | Padaelo | Lamuru | 0.035 |
| 61 | Embung Lompoe | 40 | Lalebata | Lamuru | 0.056 |
| 62 | Embung Ajangale | 55 | Turucinnae | Lamuru | 0.085 |
| 63 | Embung Poleonro | 70 | Poleonro | Ponre | 0.099 |
| 64 | Embung Allamengnge | 50 | Salampe | Ponre | 0.080 |
| 65 | Embung Bulu | 70 | Bulu | Bengo | 0.099 |

Tabel 2. 3. Lanjutan

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------------|-----|-----------------|---------|-------|
| 66 | Embung Walimpong | 519 | Walimpong | Bengo | 0.078 |
| 67 | Embung Mattirowalie | 56 | Mattirowalie | Bengo | 0.079 |
| 68 | Embung Wessa | 400 | Liliriawang | Bengo | 0.085 |
| 69 | Embung Paccekkeng | 83 | Liliriawang | Bengo | 0.117 |
| 70 | Embung Toddang Jompi | 427 | Liliriawang | Bengo | 0.600 |
| 71 | Embung Usa | 50 | Usa | Palakka | 0.078 |
| 72 | Embung Siame | 50 | Siame | Palakka | 0.078 |
| 73 | Embung Atakka | 80 | Melle | Palakka | 0.113 |
| 74 | Embung Panyili | 273 | Panyili | Palakka | 0.375 |
| 75 | Embung Tanah Tengga | 25 | Tanah Tenggara | Palakka | 0.035 |
| 76 | Embung Pasempe | 153 | Pasempe | Palakka | 0.216 |
| 77 | Embung Maccading | 25 | Tirong | Palakka | 0.672 |
| 78 | Embung Cani Sirenreng | 100 | Cani Sirenreng | Ulaweng | 0.141 |
| 79 | Embung Tadang Palie | 70 | Tadang Palie | Ulaweng | 0.099 |
| 80 | Embung Bake | 90 | Teamusu | Ulaweng | 0.126 |
| 81 | Embung Alinge | 319 | Teamusu | Ulaweng | 0.449 |
| 82 | Embung Tokeddu | 58 | Sappewalie | Ulaweng | 0.082 |
| 83 | Embung Cinnong | 120 | Sappewalie | Ulaweng | 0.169 |
| 84 | Embung Maduri | 27 | Sappewalie | Ulaweng | 0.038 |
| 85 | Embung Bukku | 97 | Mulamenre'e | Ulaweng | 0.136 |
| 86 | Embung Wanga | 50 | Mulamenre'e | Ulaweng | 0.060 |
| 87 | Embung Sura | 110 | Lilina Ajangale | Ulaweng | 0.155 |
| 88 | Embung Waetuo | 102 | Timusu | Ulaweng | 0.143 |
| 89 | Embung Pandangnge | 50 | Timusu | Ulaweng | 0.078 |
| 90 | Embung Welareng/Walenreng | 226 | Ulaweng Cinnong | Ulaweng | 0.318 |
| 91 | Embung Katapang | 49 | Ulaweng Cinnong | Ulaweng | 0.069 |
| 92 | Embung Gilingeng | 35 | Ulaweng Cinnong | Ulaweng | 0.049 |
| 93 | Embung Weddie | 69 | Pallawarukka | Ulaweng | 0.086 |
| 94 | Embung Cempaniga | 210 | Bacu | Barebbo | 0.295 |
| 95 | Embung Wollangi I | 463 | Wollangi | Barebbo | 0.521 |
| 96 | Embung Calirung | 542 | Lampoko | Barebbo | 0.563 |
| 97 | Embung Congko | 150 | Congko | Barebbo | 0.189 |
| 98 | Embung Taretta | 337 | Waeputtange | Amali | 0.944 |
| 99 | Embung Massakki | 40 | Taccipong | Amali | 0.056 |
| 100 | Embung Maccading | 25 | Tirong | Palakka | 0.448 |

Tabel 2. 3. Lanjutan (selesai)

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|-----|-------------|-----------------------|-------|
| 101 | Embung Tojang | 25 | Tirong | Palakka | 0.035 |
| 102 | Embung Palio | 30 | Tirong | Palakka | 0.042 |
| 103 | Embung Jampu | 20 | Tirong | Palakka | 0.028 |
| 104 | Embung Cenrana | 20 | Tirong | Palakka | 0.030 |
| 105 | Embung Cellu | 45 | Kel. Cellu | Tanete Riattang | 0.063 |
| 106 | Embung Padang | 25 | Kel. Majang | Tanete Riattang Barat | 0.035 |
| 107 | Embung Data | 25 | Kel. Majang | Tanete Riattang Barat | 0.042 |
| 108 | Embung Opo | 50 | Opo | Ajangngale | 0.078 |
| 109 | Embung Itterung | 252 | Itterung | Tellu Siattingnge | 0.354 |
| 110 | Embung Tajong | 230 | Tajong | Tellu Siattingnge | 0.323 |
| 111 | Embung Otting | 20 | Otting | Tellu Siattingnge | 0.028 |
| 112 | Embung Laccori | 50 | Laccori | Dua Boccoe | 0.079 |
| 113 | Embung To Cina | 300 | To Cina | Dua Boccoe | 0.422 |
| 114 | Embung Lacenno | 70 | Mario | Dua Boccoe | 0.098 |
| 115 | Embung Sailong | 350 | Sailong | Dua Boccoe | 0.492 |
| 116 | Embung Pacing | 286 | Pacing | Awangpone | 0.127 |
| 117 | Embung Tellongeng | 50 | Tellongeng | Mare | 0.080 |
| 118 | Embung Jampalenna | 65 | Cinnong | Sibulue | 0.091 |
| 119 | Embung Tempe-Tempe | 400 | Polewali | Sibulue | 0.563 |
| 120 | Embung Kawerang | 146 | Kawerang | Cina | 0.240 |
| 121 | Embung Leccemme | 50 | Walenreng | Cina | 0.081 |
| 122 | Embung Barereng | 226 | Walenreng | Cina | 0.135 |
| 123 | Embung Mannagae | 67 | Padangloang | Cina | 0.086 |
| 124 | Embung Sabila | 262 | Padangloang | Cina | 0.295 |
| 125 | Embung Tanete | 100 | Kel. Tanete | Cina | 0.141 |
| 126 | Embung Carengke | 130 | Kel. Tanete | Cina | 0.183 |
| 127 | Embung Ulu Bubung | 200 | Lompu | Cina | 0.281 |
| 128 | Embung Bubung Loang | 50 | Samaelo | Cina | 0.168 |
| 129 | Embung Kannae | 50 | Lampoko | Barebbo | 0.070 |

Sumber : Bidang Sungai Danau dan Waduk. 2018.

Tabel 2.4. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bone Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

| NO | NAMA DAERAH IRIGASI | LUAS AREAL (Ha) | LOKASI | | TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN |
|----|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| | | | KECAMATAN | DESA | |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D.I. AJJALIRENG | 150 | TELLU SIATTINGNGE | AJJALIRENG | 1996 |
| 2 | D.I. ALINGE | 319 | ULAWENG | TEAMUSU | 1995 |
| 3 | D.I. ANGASANGNGE | 120 | LAPPARIAJA | LILIRIATTANG | 1995 |
| 4 | D.I. APANGNGE | 60 | TELLU LIMPOE | GAYA BARU | 1996 |
| 5 | D.I. ATAKKA | 80 | PALAKKA | MELLE | 1995 |
| 6 | D.I. BENDUNG BATUA | 120 | CINA | KAWERANG | 1996 |
| 7 | D.I. BAKE | 90 | ULAWENG | TEAMUSU | 1995 |
| 8 | D.I. BALUBU | 120 | BENGO | MATTIROWALIE | 1995 |
| 9 | D.I. BANA | 100 | BONTOCANI | BANA | 1996 |
| 10 | D.I. BANA I/LAPAO | 94 | LAPPARIAJA | MATTAMPAWALIE | 1996 |
| 11 | D.I. BARUGAE | 102 | LAMURU | BARUGAE | 1996 |
| 12 | D.I. BONTOJAI | 306 | BONTOCANI | BONTOCANI | 1996 |
| 13 | D.I. BOTTO | 58 | TELLU SIATTINGNGE | PADA IDI | 1996 |
| 14 | D.I. BUKKU | 97 | ULAWENG | MULAMENREE | 1996 |
| 15 | D.I. BULO | 150 | LAPPARIAJA | MATTAMPAWALIE | 1987 |
| 16 | D.I. CAKULO | 60 | AMALI | TOCINNONG | 1995 |
| 17 | D.I. CAKO | 100 | LAPPARIAJA | SENGENGPALIE | 1990 |
| 18 | D.I. CALIMPONG | 100 | LAPPARIAJA | TENRI PAKKUA | 1996 |
| 19 | D.I. CALIRUNG | 542 | BAREBBO | LAMPOKO | 1987 |
| 20 | D.I. CEMPANIGA | 210 | BAREBBO | BACU | 1995 |
| 21 | D.I. CENRANA | 200 | MARE | TELLONGENG | 1990 |
| 22 | D.I. CINNONG | 120 | ULAWENG | SAPPE WALIE | 1996 |
| 23 | D.I. CIROWALI | 270 | BAREBBO | CORAWALI | 1981 |
| 24 | D.I. CONGKO | 150 | PALAKKA | CONGKO | 1996 |
| 25 | D.I. COPPO MELLE | 53 | AMALI | TOCINNONG | 1996 |
| 26 | D.I. CUCCORO/CELLIE | 76 | PALAKKA | URENG | 1996 |
| 27 | D.I. DEKKO | 286 | PONRE | MAPPESANGKA | 1995 |
| 28 | D.I. GALUNG I | 109 | ULAWENG | MULAMENREE | 1996 |
| 29 | D.I. GALUNG II | 86 | ULAWENG | GALUNG | 1996 |
| 30 | D.I. GATTARENG | 44 | PATIMPENG | GATTARENG | 1998 |
| 31 | D.I. GONA | 100 | KAJUARA | GONA | 1995 |
| 32 | D.I. INRU | 240 | BENGO | TUNGKE | 1998 |
| 33 | D.I. ITTERUNG | 252 | TELLU SIATTINGNGE | ITTERUNG | 1995 |
| 34 | D.I. JEMPO | 200 | LAPPARIAJA | SENGENGPALIE | 1996 |
| 35 | D.I. KADUPPAE/TODDANG LEMPANG | 76 | LIBURENG | TOMPO BULU | 1995 |
| 36 | D.I. KAHU | 60 | BONTOCANI | KAHU | 1999 |
| 37 | D.I. KALU | 216 | BENGO | LILIRIAWANG | 1995 |
| 38 | D.I. KANANGO | 60 | ULAWENG | GALUNG | 1995 |
| 39 | D.I. KARANGENG / PADANG LOANG | 150 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1995 |
| 40 | D.I. KAROPPA | 146 | PONRE | TURUADAE | 1995 |

Tabel 2. 4. Lanjutan

| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------|-----|-------------------|----------------|------|
| 41 | D.I. KATAPANG II | 100 | AMALI | TOCINNONG | 1995 |
| 42 | D.I. KAWERANG | 146 | CINA | KAWERANG | 1996 |
| 43 | D.I. KUNANG | 52 | BONTOCANI | LANGI | 1987 |
| 44 | D.I. LABONE | 330 | LAPPARIAJA | TENRI PAKKUA | 1995 |
| 45 | D.I. LACCORI | 130 | DUA BOCCOE | LACCORI | 1995 |
| 46 | D.I. LACEMME | 175 | CINA | WALENRENG | 1996 |
| 47 | D.I. LAJANG - LAJANG | 119 | LAPPARIAJA | SENGENPALIE | 1996 |
| 48 | D.I. LALIDDONG | 158 | BAREBBO | KAJAOLALIDDONG | 1995 |
| 49 | D.I. LAPINCE | 70 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1995 |
| 50 | D.I. LAPP JUPENG | 150 | BENGO | BENGO | 1996 |
| 51 | D.I. LAPP PORO | 100 | BONTOCANI | MATTIROWALIE | 1995 |
| 52 | D.I. LAPP TALLE | 206 | LAPPARIAJA | MATTAMPAWALIE | 1995 |
| 53 | D.I. LAPUTENG | 297 | TONRA | LIBURENG | 1996 |
| 54 | D.I. LASINA | 140 | LAMURU | LALEBATA | 1996 |
| 55 | D.I. LEKO BALLO | 227 | LAMURU | LALEBATA | 1996 |
| 56 | D.I. LERANG | 100 | CINA | ABBUMPUNGENG | 1908 |
| 57 | D.I. LONRONG | 100 | KAJUARA | ABBUMPUNGENG | 1995 |
| 58 | D.I. LONRU | 75 | BENGO | MATTIROWALIE | 1995 |
| 59 | D.I. MADDEWATAE | 60 | TELLU SIATTINGNGE | PALONGKI | 1996 |
| 60 | D.I. MALAKA | 200 | BENGO | MATTIROWALIE | 1996 |
| 61 | D.I. MALAKA II | 220 | BENGO | MATTIROWALIE | 1995 |
| 62 | D.I. MALLINRUNG | 464 | LIBURENG | MALLINRUNG | 1996 |
| 63 | D.I. MANNAGAE | 67 | CINA | PADANG LOANG | 1997 |
| 64 | D.I. MANNERA | 150 | SALOMEKKO | MANNERA | 1996 |
| 65 | D.I. MAROANGING | 110 | PATIMPENG | TALABANGI | 1995 |
| 66 | D.I. MELLE | 310 | PALAKKA | MELLE | 1996 |
| 67 | D.I. MICO | 83 | PALAKKA | MICO | 1997 |
| 68 | D.I. MONCONG | 82 | LAPPARIAJA | MATTIROWALIE | 1999 |
| 69 | D.I. PACCING | 286 | AWANGPONE | PACCING | 1996 |
| 70 | D.I. PACEKKENG | 83 | BENGO | LILIRIAWANG | 1995 |
| 71 | D.I. PADA IDI | 77 | TELLU SIATTINGNGE | PADA IDI | 1996 |
| 72 | D.I. PADANG LAMPE | 146 | LAPPARIAJA | TENRI PAKKUA | 1996 |
| 73 | D.I. PADANG TENGNGAE | 100 | BENGO | TUNGKE | 1995 |
| 74 | D.I. PALLENGORENG | 552 | TANETE RIATTANG | BIRU | 1996 |
| 75 | D.I. PALONGKI | 70 | LAMURU | BARAKKAE | 1997 |
| 76 | D.I. PALONGKI I | 83 | TELLU SIATTINGNGE | PALONGKI | 1997 |
| 77 | D.I. PAMMUSURENG | 110 | BONTOCANI | KEL. KAHU | 1995 |
| 78 | D.I. PANNAMPUNG | 109 | ULAWENG | TIMUSU | 1998 |
| 79 | D.I. PANGISORENG | 217 | CINA | ABBUMPUNGENG | 1996 |
| 80 | D.I. PANYILI | 273 | PALAKKA | PANYILI | 1995 |
| 81 | D.I. PARANGENG II | 500 | CENRANA | LEBONGNGE | 1996 |
| 82 | D.I. PARIGI | 137 | LAPPARIAJA | PARIGI | 1997 |
| 83 | D.I. PASEMPE | 153 | PALAKKA | PASEMPE | 1996 |
| 84 | D.I. PATIONGI | 150 | CINA | CINENNUNG | 1996 |
| 85 | D.I. PATTIMPA | 144 | PONRE | SALEBBA | 1995 |
| 86 | D.I. PATTUKU | 155 | BONTOCANI | PATTUKU | 1996 |
| 87 | D.I. PISING | 97 | LAMURU | MATTAMPAWALIE | 1997 |
| 88 | D.I. PONRO LIBURENG | 70 | BENGO | SELLI | 1990 |
| 89 | D.I. RABUA | 250 | TELLU LIMPOE | TONDONG BUA | 1996 |
| 90 | D.I. RAJA | 370 | LAPPARIAJA | MATTAMPAWALIE | 1995 |

Tabel 2. 4. Lanjutan

| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------------|-----|-------------------|------------------|------|
| 91 | D.I. RAPPa | 120 | TONRA | RAPPa | 1996 |
| 92 | D.I. SABILA I | 262 | CINA | PADANG LOANG | 1997 |
| 93 | D.I. SABILA II | 100 | CINA | PADANG LOANG | 1996 |
| 94 | D.I. SAILONG | 350 | DUA BOCCOE | SAILONG | 1996 |
| 95 | D.I. SAMAGORA | 158 | LAPPARIAJA | TONRONGNGE | 1996 |
| 96 | D.I. SIJELLING | 161 | TELLU SIATTINGNGE | SIJELLING | 1996 |
| 97 | D.I. SOGA | 95 | CINA | KANCO | 1996 |
| 98 | D.I. SOLORENG | 286 | LAMURU | LALEBATA | 1994 |
| 99 | D.I. SURa | 110 | ULAWENG | LILINA AJANGALE | 1996 |
| 100 | D.I. TALABANGI I | 54 | PATIMPENG | TALABANGI | 1996 |
| 101 | D.I. TABBE WALIE | 148 | ULAWENG | CANI SIDENRENG | 1996 |
| 102 | D.I. TADDAGAE | 113 | CINA | WALENRENG | 1996 |
| 103 | D.I. TAJONG | 230 | TELLU SIATTINGNGE | TAJONG | 1996 |
| 104 | D.I. TAJONG I | 184 | TELLU SIATTINGNGE | PALONGKI | 1996 |
| 105 | D.I. TALABANGI II | 80 | PATIMPENG | TALABANGI | 1996 |
| 106 | D.I. TALABANGI III | 50 | PATIMPENG | TALABANGI | 1998 |
| 107 | D.I. TANETE | 100 | CINA | LURAH T. HARAPAN | 1996 |
| 108 | D.I. TANETE BUANG | 343 | PALAKKA | MATTANETE BUA | 1977 |
| 109 | D.I. TARETTA | 337 | AMALI | WAEMPUTTANGNGE | 1981 |
| 110 | D.I. TAROGI | 200 | LAPPARIAJA | SENGENGPALIE | 1996 |
| 111 | D.I. TELLONGENG | 165 | MARE | TELLONGENG | 1999 |
| 112 | D.I. TEMPE - TEMPE | 400 | SIBULUE | POLEWALI | 1996 |
| 113 | D.I. TEPPo TAE | 62 | ULAWENG | TEAMUSU | 1996 |
| 114 | D.I. TOBEMPA | 129 | LAPPARIAJA | MATTAMPAWALIE | 1995 |
| 115 | D.I. TO CINA | 300 | DUA BOCCOE | TO CINA | 1996 |
| 116 | D.I. TODDANG JOMPI | 427 | BENGO | LILIRIAWANG | 1995 |
| 117 | D.I. TOKEDDU | 58 | ULAWENG | SAPPE WALIE | 1996 |
| 118 | D.I. TOLAGA / TALAGA | 187 | LAPPARIAJA | SENGENGPALIE | 1997 |
| 119 | D.I. TORAGI / BARAKKAE | 200 | LAMURU | BARAKKAE | 1996 |
| 120 | D.I. TUANGLEO I | 250 | CENRANA | TAWAROE | 1996 |
| 121 | D.I. ULOE I | 500 | DUA BOCCOE | KEL. UNYI | 1995 |
| 122 | D.I. ULOE II | 400 | DUA BOCCOE | ULOE | 1996 |
| 123 | D.I. ULU BUBUNG | 200 | CINA | LOMPU | 1997 |
| 124 | D.I. UNRA | 76 | AWANGPONE | UNRA | 1996 |
| 125 | D.I. WAELENNAE | 135 | TELLU SIATTINGNGE | TAJONG | 1997 |
| 126 | D.I. WAETUO | 102 | ULAWENG | TIMUSU | 1996 |
| 127 | D.I. WALENRANG / WELARENG | 209 | ULAWENG | ULAWENG CINNONG | 1995 |
| 128 | D.I. WALENRENG | 226 | CINA | WALENRENG | 1997 |
| 129 | D.I. WALIMPONG | 519 | BENGO | WALIMPONG | 1996 |
| 130 | D.I. WATANG CANI | 188 | BONTOCANI | WATANGCANI | 1997 |

Tabel 2. 4. Lanjutan

| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------|-----|-------------------|------------------|------|
| 131 | D.I. WEDDIE | 69 | ULAWENG | PALLAWARUKKA | 1996 |
| 132 | D.I. WESSA | 400 | BENGO | LILIRIAWANG | 1996 |
| 133 | D.I. WOLLANGI | 463 | BAREBBO | WOLLANGI | 1978 |
| 134 | D.I. WOLLANGI II | 94 | BAREBBO | WOLLANGI | 1996 |
| 135 | D.I. AJANGALE | 40 | LAMURU | TURUCINNAE | 1996 |
| 136 | D.I. GALUNG III | 50 | ULAWENG | GALUNG | 1996 |
| 137 | D.I. AJASSAO | 50 | LIBURENG | BARINGENG | 1996 |
| 138 | D.I. AKO BANGE | 90 | LAPPARIAJA | LILIRIATTANG | 1995 |
| 139 | D.I. ALLAMENGNGE | 100 | PONRE | SALAMPE | 1996 |
| 140 | D.I. ALLEMPONGENGNGE | 200 | BENGO | TUNGKE | 1997 |
| 141 | D.I. ASSIRAJANGE | 100 | LAPPARIAJA | MATTAMPAWALIE | 1996 |
| 142 | D.I. BARERENG | 226 | CINA | WALENRENG | 1995 |
| 143 | D.I. BATU - BATU/ELLE | 80 | TELLU LIMPOE | BONTO MASUNGGU | 1996 |
| 144 | D.I. BATUA | 80 | TELLU SIATTINGNGE | SIJELLING | 1997 |
| 145 | D.I. BATUPUTIH | 80 | TELLU LIMPOE | BATU PUTIH | 1996 |
| 146 | D.I. BILA | 200 | TELLU LIMPOE | GAYA BARU | 1995 |
| 147 | D.I. BT.MASUNGGU | 250 | TELLU LIMPOE | BONTO MASUNGGU | 1996 |
| 148 | D.I. BULU PARE'E | 150 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1996 |
| 149 | D.I. BULU - BULU | 435 | TONRA | BULU-BULU | 1997 |
| 150 | D.I. BULUSIRUA | 58 | BONTOCANI | BULU SIRUA | 1995 |
| 151 | D.I. BULUTUNGKE | 100 | LAPPARIAJA | TENRI PAKKUA | 1996 |
| 152 | D.I. CALIMA | 125 | PONRE | MATTAMPAE | 1997 |
| 153 | D.I. CAMILO | 150 | KAHU | CAMILO | 1996 |
| 154 | D.I. CARENGKE | 130 | CINA | LURAH T. HARAPAN | 1995 |
| 155 | D.I. CIMELLU | 70 | LAPPARIAJA | TENRI PAKKUA | 1996 |
| 156 | D.I. COMPONGE | 200 | TELLU SIATTINGNGE | ULO-ULO | 1997 |
| 157 | D.I. DEWATAE | 70 | ULAWENG | TADANG PALIE | 1996 |
| 158 | D.I. ERE CINNONG | 250 | BONTOCANI | ERE CINNONG | 1995 |
| 159 | D.I. GALUNG LANGI | 30 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1997 |
| 160 | D.I. GANJA / SALO TELLUE | 110 | BAREBBO | WATU | 1996 |
| 161 | D.I. IPIE | 35 | TELLU SIATTINGNGE | PALONGKI | 1995 |
| 162 | D.I. JAMPU | 80 | TELLU SIATTINGNGE | SIJELLING | 1996 |
| 163 | D.I. JERAE | 114 | PONRE | PATIMPA | 1997 |
| 164 | D.I. JOMPENG | 200 | TELLU SIATTINGNGE | SIJELLING | 1996 |
| 165 | D.I. KALOBBAE | 50 | LAPPARIAJA | TENRI PAKKUA | 1995 |
| 166 | D.I. KATAPANG | 49 | ULAWENG | TEAMUSU | 1996 |
| 167 | D.I. LACENNO | 70 | DUA BOCCOE | MARIO | 1997 |
| 168 | D.I. LACORI / BATU LAPPA | 50 | LAPPARIAJA | SENGENPALIE | 1996 |
| 169 | D.I. LALOMPENG | 80 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1995 |
| 170 | D.I. LAMONCONG | 100 | BONTOCANI | LAMONCONG | 1996 |
| 171 | D.I. LANGI | 300 | BONTOCANI | LANGI | 1997 |
| 172 | D.I. LAPPA GALUNG | 50 | LIBURENG | TOMPO BULU | 1996 |
| 173 | D.I. LAPPA KANRUNG | 200 | BONTOCANI | MATTIROWALIE | 1995 |
| 174 | D.I. LAPPAPAO BEDDA | 75 | LAMURU | MAMMINASAE | 1996 |
| 175 | D.I. LAWARA | 80 | LAMURU | BARUGAE | 1997 |
| 176 | D.I. LEMPANG | 140 | LAPPARIAJA | TONRONGNGE | 1996 |
| 177 | D.I. LIBUKANGE | 75 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1995 |
| 178 | D.I. LOMPU | 150 | CINA | LOMPU | 1996 |
| 179 | D.I. LONRONG | 90 | PONRE | PATTIMPA | 1997 |
| 180 | D.I. LOPPA | 70 | TELLU LIMPOE | POLEWALI | 1996 |

Tabel 2. 4. Lanjutan (selesai)

| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------------------|-----|-------------------|----------------|------|
| 181 | D.I. MALONGKA / LAMACENG | 70 | LAMURU | SENGENPALIE | 1997 |
| 182 | D.I. MALLINRUNG I | 150 | LIBURENG | MALLINRUNG | 1996 |
| 183 | D.I. MASSAPAE | 150 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1996 |
| 184 | D.I. MASSAPAE | 50 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1996 |
| 185 | D.I. MAMMINASAE | 76 | LAMURU | MAMMINASAE | 1996 |
| 186 | D.I. MAGENRANG | 100 | KAHU | MAGGENRANG | 1995 |
| 187 | D.I. NAGAE / MASSAPPAE | 150 | TELLU LIMPOE | GAYA BARU | 1995 |
| 188 | D.I. OTTING | 20 | TELLU SIATTINGNGE | OTTING | 1997 |
| 189 | D.I. PADANGLOANG | 150 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1996 |
| 190 | D.I. PALACARI | 80 | PONRE | SALEBBA | 1995 |
| 191 | D.I. PALONGKI II | 51 | TELLU SIATTINGNGE | PALONGKI | 1996 |
| 192 | D.I. PANDANGNGE | 50 | ULAWENG | TIMUSU | 1997 |
| 193 | D.I. PASEMPE I | 50 | PALAKKA | PASEMPE | 1995 |
| 194 | D.I. PASSAPPARENG | 50 | LAMURU | MASSENRENGPULU | 1996 |
| 195 | D.I. PATTUKU LIMPOE | 80 | LAPPARIAJA | PATTUKU LIMPOE | 1997 |
| 196 | D.I. PANYILI II | 50 | PALAKKA | PANYILI | 1996 |
| 197 | D.I. PERANGENG | 200 | CENRANA | WATANG CENRANA | 1996 |
| 198 | D.I. POLEONRO | 70 | PONRE | POLEONRO | 1995 |
| 199 | D.I. PONRE - PONRE | 500 | LIBURENG | PONRE-PONRE | 1996 |
| 200 | D.I. RUMPIA | 270 | KAHU | MATAJANG | 1997 |
| 201 | D.I. SAMAENRE | 74 | TELLU LIMPOE | SAMAENRE | 1996 |
| 202 | D.I. SIAME | 45 | PALAKKA | SIAME | 1995 |
| 203 | D.I. SOGA I | 150 | CINA | KANCO | 1996 |
| 204 | D.I. TANAH TENGAH | 60 | LIBURENG | BARINGENG | 1997 |
| 205 | D.I. TANGKULU | 150 | BONTOCANI | WATANGCANI | 1996 |
| 206 | D.I. TAPAMPANG / DATA | 60 | TELLU LIMPOE | POLEWALI | 1995 |
| 207 | D.I. TAPONG | 80 | TELLU LIMPOE | TAPONG | 1996 |
| 208 | D.I. TAPPARENG | 100 | TELLU SIATTINGNGE | SIJELLING | 1997 |
| 209 | D.I. TELLANGKERE | 102 | TELLU LIMPOE | TELLANGKERE | 1996 |
| 210 | D.I. TELLU BOCCOE | 110 | PONRE | TELLU BOCCOE | 1995 |
| 211 | D.I. TELLU LIPUE | 65 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1996 |
| 212 | D.I. TEPPAE | 150 | LAPPARIAJA | PATTUKU LIMPOE | 1997 |
| 213 | D.I. TOCUMA | 75 | TELLU SIATTINGNGE | AJJALIRENG | 1996 |
| 214 | D.I. TOMPO BARUTTUNG | 50 | LAMURU | PADAELO | 1995 |
| 215 | D.I. TOMPO BULU | 105 | LIBURENG | TOMPO BULU | 1996 |
| 216 | D.I. TONDONG BUA | 120 | TELLU LIMPOE | TONDONG BUA | 1997 |
| 217 | D.I. TONRONGNGE | 175 | LAPPARIAJA | TONRONGNGE | 1996 |
| 218 | D.I. TORAGI | 200 | LAMURU | MATTAMPA BULU | 1995 |
| 219 | D.I. TORETTE / MATTAMPAWALIE | 100 | LAMURU | MATTAMPAWALIE | 1997 |
| 220 | D.I. TUANGLEO | 350 | CENRANA | TAWAROE | 1996 |
| 221 | D.I. TUANGLEO II | 300 | CENRANA | TAWAROE | 1995 |
| 222 | D.I. ULAWENG | 100 | LAPPARIAJA | TENRI PAKKUA | 1996 |
| 223 | D.I. WANGA | 50 | ULAWENG | MULAMENREE | 1997 |
| 224 | D.I. WOLLANGI III | 94 | BAREBBO | WOLLANGI | 1996 |

Sumber : Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015.

Ringkasan aset, sarana dan prasarana sumber daya air yang ada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Aset, Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air
di Kabupaten Bone Hingga Tahun 2017

| No | Aset, Sarana, Prasarana | Jenis | Keterangan |
|----|----------------------------|---|------------|
| 1 | Bangunan Utama | Bendung; Embung; Kolam Mata Air | 265 Buah |
| 2 | Bangunan Pembagi Air | Bagi; Bagi Sadap; Sadap | 907 Buah |
| 3 | Bangunan Pengatur Air | Pintu Air | 33 Buah |
| 4 | Bangunan Pelengkap | Talang; Pelimpah; Gorong-Gorong; Jembatan; Jembatan Hewan | 369 Buah |
| 5 | Saluran Pembawa | Induk | 336.222 M |
| | | Sekunder | 74.979 M |
| | | Tersier | - |
| 7 | Bangunan Pengendali Banjir | Tanggul Pantai | 112 M |
| | | Perkuatan Tebing (Bronjong, Pasangan Batu) | 8.717 M |

Sumber : Bidang Sungai Danau & Waduk. 2018; Bidang Irigasi Rawa Pantai & Air Baku. 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2013-2017

Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Untuk pelayanan di bidang pekerjaan umum, indikator yang sering digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan tersebut ada 3 (tiga), yaitu: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan/atau *Millenium Development Goal's (MDG's)*. Terkait dengan pencapaian kinerjanya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menggunakan 2 indikator SPM, yakni persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan rasio jaringan irigasi, disamping indikator program (*outcome*) dan indikator kegiatan (*output*) dari Rancangan Renstra ini sendiri. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone disajikan pada Tabel 2.5.

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | Satuan | Target SPM | Target Renstra Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | | |
|---|---|---------|------------|--|------------|------------|------------|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | $\frac{(15)-((10)/(5))}{1} \times 100\%$ | $\frac{(16)-((11)/(6))}{1} \times 100\%$ | $\frac{(17)-((12)/(7))}{1} \times 100\%$ | $\frac{(18)-((13)/(8))}{1} \times 100\%$ | $\frac{(19)-((14)/(9))}{1} \times 100\%$ | |
| BIDANG SUMBER DAYA AIR (2013 - 2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | | | Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pangkajene Kepulauan | | | | | | | | | | | |
| a. | Terbangunnya fasilitas penangkaran sumber-sumber air (embung, kolam, cekdam). | Unit | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik | % | - | 87.464 Km | 131.626 Km | 175.788 Km | 457.951 Km | | 10.590 Km | 11.540 Km | 8.960 Km | 38.450 Km | | 12.11% | 8.77% | 5.10% | 8.40% | | |
| b. | Terpeliharanya/terehabilitasi bantaran dan tanggul sungai | Km | - | - | - | - | - | | 0.710 | 3.902 | 1.591 | 0.310 | | - | - | - | - | - | |
| | Terbersihkan/terkeruknya sungai/kali | Km | - | - | - | - | - | | 0.350 | 5.150 | 1.230 | 2.101 | | - | - | - | - | - | |
| c. | Terbangunnya pintu air irigasi | Buah | - | - | - | - | - | | 15 | 11 | 6 | - | | - | - | - | - | - | |
| d. | Rasio jaringan irigasi | M/Ha | - | - | - | - | - | | 2.450 Km | 2.300 Km | 3.250 Km | 10.160 Km | | - | - | - | - | - | |
| 3 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Terbangunnya Sumur-Sumur Air Tanah (SAT) | Unit | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (2017 dst.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (2 Program) | | | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air | | | | | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air | | | | | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air | | | | - | |
| a. | Terbangunnya fasilitas penangkaran sumber-sumber air (embung, kolam, cekdam). | Unit | - | | | | | - | | | | | 9 | | | | | - | |
| 2 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| a. | Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik | % | - | | | | | 264.113 Km | | | | | 10.640 Km | | | | | 4.03% | |
| b. | Terpeliharanya/terehabilitasi bantaran dan tanggul sungai | Km | - | | | | | - | | | | | 2.204 | | | | | - | |
| | Terbersihkan/terkeruknya sungai/kali | Km | - | | | | | - | | | | | 15.501 | | | | | - | |
| c. | Terbangunnya pintu air irigasi | Buah | - | | | | | - | | | | | 1 | | | | | - | |
| d. | Rasio jaringan irigasi | M/Ha | - | | | | | - | | | | | 18.650 Km | | | | | - | |
| 3 | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| a. | Terbangunnya Sumur-Sumur Air Tanah (SAT) | Unit | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | |
| 4 | Program Penyelenggaraan Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| a. | Pengelolaan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) | Dokumen | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | |

Sumber : Dokumen Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kabupaten Bone 2013-2018; Laporan LPPD Tahun 2017 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.

Dari Dari Tabel 2.6 atau Tabel T-C.23. nampak bahwa di Tahun 2013 – 2016 Rancangan Renstra yang ada merupakan rencana kerja strategis dari Bidang Sumber Daya Air yang merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, sementara di Tahun 2017 merupakan penyempurnaan waktu Rancangan Renstra 5 (lima) Tahunan yang bermula di Tahun 2013. Di Tahun 2017 tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sudah terbentuk dan berdiri sendiri sebagaimana telah dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 62).

Pun demikian dari Tabel 2.6 atau Tabel T-C.23, dapat dilihat bahwasanya parameter maupun hasil nilai dari Kolom Target Rancangan Renstra Pada Tahun Ke-1 (2013) – Tahun Ke-5 (2017) yang dikutip dari Dokumen Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2013-2017, tidak sejalan dan tidak selaras dengan parameter dan nilai yang tertuang di Kolom Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-1 (2013) – Tahun Ke-5 (2017) yang disadur dari Laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah (LPPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2017. Hal ini diakibatkan kurangnya atau bahkan mungkin tidak adanya proses cek dan ricek terhadap kedua dokumen rujukan tersebut, sehingga memungkinkan adanya faktor koreksi dan revisi terhadap kebenaran atau kesesuaian penyusunan Dokumen Rancangan Renstra tersebut dengan petunjuk teknis dan aturan yang ada terkait dengan penyusunan dokumen- dokumen yang dimaksud. Untuk itu dalam upaya menyelaraskan antara target dan capaian Rancangan Renstra ini maka Tabel 2.6. dimodifikasi sebagaimana yang ditampilkan di atas.

Dari tabel nampak pula bahwa pada Kolom Target Rancangan Renstra hanya tertuang 1 (satu) kegiatan sementara pada Kolom Realisasi Capaian Rancangan Renstra terdapat 5 (lima) item kegiatan. Dari tabel pula dapat dibaca bahwa realisasi capaian Rancangan Renstra untuk indikator persentase irigasi

kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sangat jauh dari yang ditargetkan. Demikian pula trend pencapaian realisasi selama Tahun 2013 – Tahun 2017 yang cenderung naik turun tidak berbanding lurus dengan trend peningkatan targetnya yang cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Demikian pula gap pencapaian realisasi dan target tiap tahunnya masih tergolong jauh yang dibuktikan dengan angka persentase rasio realisasi capaian dengan yang ditargetkan masih terbilang kecil (kurang baik). terjadinya fenomena seperti yang disebutkan di atas boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Perencanaan yang tidak akurat;
2. Perumusan target yang tidak dan atau kurang mempertimbangkan alokasi anggaran di tahun-tahun sebelumnya;
3. Ketidak stabilan pendapatan daerah yang berimbas pada pengalokasian anggaran yang tidak berimbang dan cenderung tidak pasti (tidak tetap) dari tahun ke tahun.

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Pendanaan Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | | Keterangan |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|
| | | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | 1 (2013) | 2 (2014) | 3 (2015) | 4 (2016) | 5 (2017) | Anggaran | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | $\frac{(13)-(8)/(13)}{100\%}$ | $\frac{(14)-(9)/(14)}{100\%}$ | $\frac{(15)-(10)/(15)}{100\%}$ | $\frac{(16)-(11)/(16)}{100\%}$ | $\frac{(17)-(12)/(17)}{100\%}$ | (18) | (19) | Rencana |
| BIDANG SUMBER DAYA AIR (2013 - 2016) | | 13,786,855,825.00 | 22,545,163,150.00 | 22,729,447,362.00 | 50,874,088,700.00 | - | 12,033,917,975.00 | 20,910,077,988.00 | 21,960,899,762.00 | 42,097,818,100.00 | - | 87.29% | 92.75% | 96.62% | 82.75% | - | 62.72% | 56.83% | 2013-2016 |
| 1 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 964,447,000.00 | 1,069,124,000.00 | 1,239,546,000.00 | 625,940,000.00 | Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 881,479,500.00 | 997,944,000.00 | 1,212,779,000.00 | 599,810,750.00 | Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 91.40% | 93.34% | 97.84% | 95.83% | Beralih Ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | -7.57% | -5.27% | 2013-2016 |
| a | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | 964,447,000.00 | 1,069,124,000.00 | 1,239,546,000.00 | 625,940,000.00 | | 881,479,500.00 | 997,944,000.00 | 1,212,779,000.00 | 599,810,750.00 | | 91.40% | 93.34% | 97.84% | 95.83% | | -7.57% | -5.27% | 2013-2016 |
| 2 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 12,822,408,825.00 | 21,476,039,150.00 | 20,990,343,362.00 | 49,917,350,800.00 | | 11,152,438,475.00 | 19,912,133,988.00 | 20,373,905,662.00 | 41,190,018,350.00 | | 86.98% | 92.72% | 97.06% | 82.52% | | 67.68% | 61.01% | 2013-2016 |
| a | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 11,301,931,325.00 | 12,887,196,150.00 | 11,299,326,362.00 | 36,655,872,400.00 | | 9,815,244,875.00 | 11,768,260,488.00 | 10,814,661,462.00 | 28,771,027,200.00 | | 86.85% | 91.32% | 95.71% | 78.49% | | 75.37% | 59.28% | 2013-2016 |
| b | Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai | 1,119,051,000.00 | 7,284,343,000.00 | 4,009,588,500.00 | 1,424,520,900.00 | | 1,055,221,000.00 | 6,977,935,500.00 | 3,972,723,600.00 | 1,353,351,750.00 | | 94.30% | 95.79% | 98.59% | 95.00% | | 147.20% | 150.76% | 2013-2016 |
| c | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun | 401,426,500.00 | 1,304,500,000.00 | 1,695,160,500.00 | 429,621,500.00 | | 281,972,600.00 | 1,165,938,000.00 | 1,673,618,000.00 | 342,100,000.00 | | 70.24% | 89.38% | 98.73% | 79.63% | | 60.09% | 92.49% | 2013-2016 |
| d | Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi | - | - | 3,966,268,000.00 | 11,407,336,000.00 | | - | - | 3,912,902,600.00 | 10,723,539,400.00 | | - | - | 98.65% | 94.01% | | 187.61% | 174.06% | 2015-2016 |
| 3 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | - | - | 499,558,000.00 | 330,797,900.00 | | - | - | 374,215,100.00 | 307,989,000.00 | | - | - | 74.91% | 93.10% | | -33.78% | -17.70% | 2015-2016 |
| a | Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah | - | - | 499,558,000.00 | 330,797,900.00 | | - | - | 374,215,100.00 | 307,989,000.00 | | - | - | 74.91% | 93.10% | | -33.78% | -17.70% | 2015-2016 |
| DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (2017 dst.) | | - | - | - | - | 41,916,825,600.00 | - | - | - | - | 40,744,424,650.00 | - | - | - | - | 97.20% | - | - | - |
| 1 | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (2 Program) | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air | | | | 859,766,250.00 | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air | | | | 849,869,250.00 | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air | | | | 98.85% | 3.66% | 6.47% | 2013-2017 |
| a | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | | | | | 859,766,250.00 | | | | | 849,869,250.00 | | | | | 98.85% | 3.66% | 6.47% | 2013-2017 |
| 2 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | | | | | 40,865,630,450.00 | | | | | 39,871,747,500.00 | | | | | 97.57% | 46.23% | 44.96% | 2013-2017 |
| a | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | | | | | 11,612,820,500.00 | | | | | 11,444,629,350.00 | | | | | 98.55% | 39.45% | 29.40% | 2013-2017 |
| b | Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai | | | | | 10,977,518,150.00 | | | | | 10,749,366,400.00 | | | | | 97.92% | 278.06% | 286.64% | 2013-2017 |
| c | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun | | | | | 797,861,000.00 | | | | | 764,583,500.00 | | | | | 95.83% | 66.49% | 100.24% | 2013-2017 |
| d | Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi | | | | | 17,477,430,800.00 | | | | | 16,913,168,250.00 | | | | | 96.77% | 120.41% | 115.89% | 2015-2017 |
| 3 | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | | | | | 22,807,900.00 | | | | | 22,807,900.00 | | | | | 100.00% | -63.44% | -55.15% | 2015-2017 |
| a | Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah | | | | | 22,807,900.00 | | | | | 22,807,900.00 | | | | | 100.00% | -63.44% | -55.15% | 2015-2017 |
| 4 | Program Penyelenggaraan Irigasi | | | | | 168,621,000.00 | | | | | - | | | | | - | - | - | 2017 |
| a | Pengelolaan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2) | | | | | 168,621,000.00 | | | | | - | | | | | - | - | - | 2017 |

Sumber : Laporan Keuangan dan Fisik Tahun 2013-2016. Dinas PU dan SDA; Laporan Keuangan dan Fisik Tahun 2017 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone disajikan dalam Tabel 2.7 (Tabel T-C.24). Secara umum tingkat realisasi anggaran dari Tahun 2013-2016 saat masih berstatus Bidang Sumber Daya Air hingga setelah menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2017 tergolong tinggi dan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya rasio realisasi dan anggaran di tiap tahunnya yakni rata-rata di atas 80%, baik saat masih berstatus bidang maupun setelah berdiri sendiri jadi dinas tersendiri. Rata-rata pertumbuhan anggaran saat masih berstatus bidang selama kurun waktu 2013-2016 sebesar 62.72% dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendanaan sebesar 56.83%. Adanya selisih antara anggaran dan realisasi pendanaan umumnya dipicu oleh adanya dana retensi dari pekerjaan-pekerjaan konstruksi (belanja modal) yang belum dicairkan saat pekerjaan telah selesai melainkan menunggu masa pemeliharaan berakhir (enam pasca serah terima awal pekerjaan) yang umumnya melampaui tahun anggaran berjalan.

Nampak pula dari tabel di atas bahwa saat masih berstatus bidang, alokasi dan serapan anggaran terbesar selama kurun waktu 2013-2016 disumbang oleh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, disusul oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam lalu kemudian Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Sementara di tahun 2017 ketika sudah menjadi dinas tersendiri, alokasi dan serapan anggaran terbesar masih disumbang oleh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; lalu disusul oleh Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; lalu Program Penyelenggaraan Irigasi dan Program Pengadaan dan Pengolahan Air Baku.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Tantangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten bone semakin berat dan kompleks, beberapa tantangan ke depan antara lain :

1. Semakin besarnya potensi konflik antar pengguna air.
2. Masih kurangnya peran serta/kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air.
3. Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi *inflow* air yang masuk ke waduk/embung/bending sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air.
4. Semakin menurunnya kualitas air karena banyaknya pencemaran air.
5. Adanya potensi masalah rob dan limpasan air laut di beberapa daerah kawasan pantai yang ada di Kabupaten Bone
6. Pengelolaan sumber daya air tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan.
7. Prinsip pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan.
8. Tingkat kemiskinan masyarakat khususnya masyarakat tani yang masih tergolong tinggi.

Adapun peluang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten bone dalam mengembangkan pelayanannya diantaranya :

1. Adanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air.
2. Adanya potensi sumber daya air yang besar.
3. Masih banyaknya potensi daerah-daerah irigasi baru yang bisa dibangun dan dikembangkan.
4. Adanya kebutuhan air dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.
5. Adanya bantuan dana transfer dari Pusat melalui mekanisme DAK.
6. Adanya kerja sama yang baik dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompean Jeneberang.
7. Adanya peninjauan kembali produk hukum RTRWP dan RTRW Kabupaten Bone yang memungkinkan perubahan-perubahan kawasan pertanian produktif yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bone.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung kinerja.
2. Masih kurangnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang ada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air baik mengenai tugas pokok dan fungsinya masing – masing maupun tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut.
3. Kurangnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) dalam menanggulangi luapan dan banjir rob yang terjadi baik di daerah-daerah pemukiman maupun di kawasan-kawasan produktif yang ada di daerah-daerah pantai tersebut akibat adanya fluktuasi pasang surut air laut di daerah-daerah pantai (kawasan pesisir) yang ada di Kabupaten Bone yang cenderung tidak menentu baik disebabkan pengaruh inkonsistensi iklim maupun pengaruh pemanasan global.
4. Banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang rawan longsor akibat pengaruh erosi banjir dan ketidak stabilan lereng yang berpotensi mengganggu keseimbangan pengaliran sungai maupun dapat membahayakan fasilitas-fasilitas sumber daya air yang ada di sekitarnya.
5. Banyaknya sungai utama yang mengalami laju aggradasi

(pendangkalan dasar sungai oleh sedimen) yang mengurangi kapasitas pengaliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.

6. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian banjir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
7. Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air untuk keperluan irigasi.
8. Adanya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan.
9. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
10. Masih kurangnya bangunan/fasilitas penangkar/konservasi air tanah yang terbangun.
11. Banyaknya bangunan-bangunan utama (pengambilan, pembagi, penguras) yang belum dilengkapi dengan pintu air.
12. Masih adanya jaringan irigasi yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
13. Adanya bangunan pintu air yang mengalami kerusakan.
14. Masih kurangnya pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi yang sudah terbangun.
15. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas petani pemakai air yang responsif gender.
16. Masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk pembenahan jaringan irigasi tambak yang sudah terbangun di Kabupaten Bone.
17. Masih banyaknya potensi daerah irigasi baru yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bone yang belum dibangun dan atau butuh untuk dikembangkan.

18. Belum memadainya tingkat pelayanan operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru terbentuk.
19. Belum memadainya *database* irigasi, tambak, sungai, bangunan konservasi dan pantai.
20. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku untuk masyarakat.
21. Masih kurangnya sumur-sumur air tanah yang terbangun dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bone Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2019-2023, adalah:

"Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya saing Dan Sejahtera"

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Masyarakat Bone adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Bone
2. Mandiri dalam pengertian mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, pemberdayaan pelaku ekonomi dan kelestarian lingkungan.

3. Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan di tingkat global.
4. Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Bone.

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten, dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, yang akan ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Untuk menerjemahkan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Bone ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, maka dapat ditelaah dari misi ke-2 (kedua) dari RPJMD Kabupaten Bone

Tahun 2018– 2023 yaitu :

“Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.”

Peran Dinas Pengelolaan Sumber Daya air dalam ikut mencapai misi ke-2 (kedua) melalui 4 (empat) program prioritas yaitu :

1. Program Pengendalian Banjir
2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
4. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

3.3. Telaahan Rancangan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Rancangan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan program-programnya sesuai RPJMN , diantaranya yang sangat terkait dengan tupoksi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan matriks Rancangan Renstra Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tujuan meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.

Adapun sasaran strategis dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air Rancangan Renstra Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat ini adalah meningkatkan layanan jaringan irigasi dan rawa, meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan, serta berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir. Adapun *outcome* dari program ini adalah meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

Adapun faktor penghambat diantaranya:

1. Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pelestarian fungsi dan layanan sumber daya air.
2. Perubahan iklim dan fenomena *el-nino* serta indeks kekeringan yang tinggi dan tidak menentu berdampak pada kurangnya ketersediaan air pada sumber-sumber air (sungai, cekungan air tanah, dan tampungan-tampungan alami lainnya) pada musim-musim tertentu.
3. Rendahnya mutu perencanaan dan lemahnya pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur jaringan irigasi dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan yang harus diakomodir dan perumusan serta penganggaran kegiatan yang belum menganut prinsip pembangunan yang efektif dan efisien.
4. Penanganan dan penanggulangan permasalahan banjir dan genangan yang masih bersifat sektoral dan kasuistik yang belum mampu menuntaskan masalah karena belum dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif yang langsung menyentuh akar permasalahan banjir, serta belum didukung oleh perencanaan penanganan dan penanggulangan banjir yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait, yang dituangkan dalam suatu *masterplan* penanganan banjir khususnya dalam wilayah perkotaan.
5. Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Bone yang belum selesai.

Adapun faktor pendorong diantaranya:

1. Mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

ekonomi khususnya di sektor pertanian.

2. Ketersediaan sumber dana untuk mendukung kegiatan.
3. Penyelesaian penetapan RTRW Kabupaten Bone, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembangunan.

Dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam pencapaian target Rancangan Renstra Dinas PSDA maupun RPJMD Kabupaten Bone adalah :

1. Adanya dana transfer daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Serta Jaringan Pengairan Lainnya.
2. Adanya Program *Integration Participatory Development Management Irrigation Project (IPDMIP)* untuk pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, penyediaan dan pengolahan air baku, serta pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kegiatan-kegiatan di bawah ini adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan membutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir di RTRWK akan diakomodir dalam revisi RTRWK serta yang belum direncanakan untuk dilakukan KLHS padanya, akan diakomodir dalam revisi Rancangan Renstra berikutnya.

1. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya, yang meliputi pembuatan embung, kolam tampungan buatan, kolam mata air, dan cekdam.
2. Peningkatan Konservasi Air Tanah, yang meliputi pembuatan bangunan/fasilitas penangkar/konservasi air tanah.
3. Pembangunan Jaringan Irigasi, yang meliputi pengembangan jaringan-jaringan irigasi baru yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan

penyangga pertanian.

4. Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah, baik untuk keperluan irigasi pertanian maupun untuk pemenuhan suplai air baku masyarakat.

Adapun faktor penghambat diantaranya:

1. Revisi RTRWK masih sementara berproses saat Rancangan Renstra ini disusun.
2. Kegiatan KLHS terhadap kegiatan-kegiatan di atas belum dimasukkan dalam Rancangan Renstra ini karena belum adanya kesepahaman antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air selaku *stakeholder* yang membutuhkan kajian ini dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi yang memiliki tupoksi terkait dengan kegiatan ini.

Adapun faktor pendorong diantaranya:

1. Menunggu penetapan revisi RTRWK.
2. Kesesuaian program prioritas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan RTRWK.
3. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Startegis

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan memperhatikan bahwa isu tersebut:

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Rancangan Renstra K/L dan Provinsi,
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
3. Berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone,
4. Menjadi faktor pendorong terhadap peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Bone,

5. Kemudahan untuk menangani, dan
6. Prioritas janji politik yang harus diwujudkan.

Adapun isu-isu strategis dari identifikasi masalah dari program-program prioritas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut:

1. Masih kurangnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) yang sudah terbangun di daerah-daerah pantai yang ada di Kabupaten Bone.
2. Masih banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang sangat rentan atau rawan longsor.
3. Tingginya tingkat aggradasi atau pendangkalan dasar sungai yang terjadi di sungai-sungai utama yang ada di Kabupaten Bone.
4. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal ini oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Masih kurangnya dan atau belum optimalnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air permukaan, dan bangunan konservasi air tanah.
6. Belum lengkapnya dan atau belum optimalnya fasilitas pintu air yang ada pada bangunan-bangunan pengambilan air irigasi yang sudah terbangun.
7. Kurangnya pengalokasian anggaran O dan P jaringan irigasi yang sudah terbangun dan untuk keperluan pembenahan irigasi tambak yang sudah terbangun.
8. Masih kurangnya kegiatan pemberdayaan petani pemakai air yang responsif gender.
9. Masih banyaknya potensi irigasi baru yang belum dikembangkan.
10. Terbentuknya 8 (delapan) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air belum dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan operasional.
11. Penyusunan *database* irigasi, tambak, sungai, bangunan konservasi dan pantai yang belum memadai.

12. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan, saluran pembawa, dan sumur-sumur air tanah untuk pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Bone maka dirumuskan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah misi ke-1 (satu) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan misi ke-4 (empat) yaitu mengoptimalkan akselerasi pembangunan

daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Untuk misi ke-1 (satu), tujuan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah tujuan ke-1 (satu) yakni mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan, yang diukur dengan indikator nilai SAKIP dengan target peningkatan dari Predikat C di tahun dasar RPJMD (2017) menjadi Predikat B di tahun akhir RPJMD (2023).

Untuk misi ke-4 (empat), tujuan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah tujuan ke-11 (sebelas) yakni mengembangkan infrastruktur dasar, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar bidang sumber daya air, yang diukur dengan tiga indikator kinerja utama sebagaimana yang akan dijabarkan dalam pembahasan selanjutnya.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi tersebut maka ditetapkanlah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Indikator tujuan ini adalah predikat evaluasi SAKIP oleh APIP (Inspektorat Daerah) dengan target kinerja yang ingin dicapai dari Predikat C di tahun dasar Rancangan Renstra (2017) menjadi Predikat A di tahun akhir RPJMD (2023).

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Indikator tujuan ini juga menjadi indikator kinerja utama (IKU) dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang terjabarkan menjadi 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 10% di tahun dasar Rancangan Renstra (2017) menjadi 70% di tahun akhir RPJMD (2023).
- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 76,72% di tahun dasar Rancangan Renstra (2017) menjadi 85% di tahun akhir RPJMD (2023).
- Rasio jaringan irigasi, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 4,85 Meter/Hektar di tahun dasar Rancangan Renstra (2017) menjadi 4,97 Meter/Hektar di tahun akhir RPJMD (2023).

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Terkait dengan tujuan jangka menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di atas, maka dirumuskanlah sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air, yang diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran yang juga menjadi indikator tujuan Rancangan Renstra ini, yaitu:
 - Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
2. Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman, yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran:
 - Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman.
 - Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing.
 - Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi.
3. Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi, yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang juga menjadi indikator tujuan Rancangan Renstra ini, yaitu:
 - Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru.
 - Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.
 - Rasio jaringan irigasi.

Selengkapnya, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 tertuang dalam Tabel 4.1.

Keselarasan antara misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan dan sasaran Rancangan Renstra pelayanan perangkat daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone beserta unit kerja (bidang) penanggung jawab pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.25)

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | BASELINE | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|-----|--|---|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | C | CC | B | B | BB | BB | A |
| 2 | Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan | Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman. | Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman. | NA | 5.00% | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 25.00% | 30.00% |
| | | | Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing. | NA | 5.00% | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 70.00% | 80.00% |
| | | | Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi. | NA | 5.00% | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 70.00% | 80.00% |
| | | Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi. | Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru (IKU). | 10.00% | 20.00% | 30.00% | 40.00% | 50.00% | 60.00% | 70.00% |
| | | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU). | 76.72% | 78.10% | 79.48% | 80.86% | 82.24% | 83.62% | 85.00% |
| | | | Rasio jaringan irigasi (IKU). | 3.71 M/Ha | 4.30 M/Ha | 4.68 M/Ha | 5.05 M/Ha | 5.44 M/Ha | 5.83 M/Ha | 6.21 M/Ha |

Keterangan: NA = *Not Available*; Data belum ada/semantara pendataan.

Sumber: Hasil Rumusan

Tabel 4.2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023

| | | | |
|---|---|---|--|
| Misi : Ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ke-4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan. | | RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023 | |
| Tujuan : 1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 11. Mengembangkan infrastruktur dasar. | | | |
| Sasaran : 1.1. : Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan. 11.1 : meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar. | | | |
| Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | PenanggungJawab |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (Misi Ke-1; Tujuan 1). | Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air (Sasaran 1.1). | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP. | Sekretariat; Seluruh Bidang |
| Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan (Misi Ke-4; Tujuan 11). | Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman (Sasaran 11.1). | Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman. | Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku. |
| | | Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing. | Bidang Sungai, Danau dan Waduk. |
| | | Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi. | Bidang Sungai, Danau dan Waduk. |
| | Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi (Sasaran 11.1). | Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru (IKU). | Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku. |
| | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU). | Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku. |
| | | Rasio jaringan irigasi (IKU). | Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku. |

Sumber: Hasil Rumusan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan pencapaian misi ke-1 (satu) Pemerintah Kabupaten Bone, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, maka diperlukan strategi yang terimplementasi dalam arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jika dikelompokkan maka setidaknya terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam mewujudkan 8 (delapan) strategi dari pencapaian 3 (tiga) sasaran dalam rangka menuju 2 (dua) tujuan Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2018-2023 ini.

Ringkasan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam 5 (lima) tahun ke depan terangkum dalam Tabel.5.1 (Tabel T-C.26).

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Tabel T-C.26)

| Visi : Masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera | | | |
|--|--|--|--|
| Misi Ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah. | 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air. | 1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan. | 1. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. |
| | | 2. Meningkatkan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan/kinerja. | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang berintegritas . |
| | | | 1. Peningkatan konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pelaporan pertanggungjawaban (Renstra, Renja, RKA, DPA/DPPA, SPJ dan LKJIP). |
| Misi Ke-4 : Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. | 1. Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman. | 1. Mewujudkan ketersediaan data daerah rawan banjir yang aktual dan berkesinambungan. | 1. Pemenuhan kebutuhan akan database sungai dan pantai. |
| | | 2. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir (alami maupun buatan). | 2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian sasaran. |
| | | 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian banjir. | 1. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibutuhkan. |
| | 2. Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi. | 1. Mewujudkan ketersediaan data daerah irigasi dan fasilitas penunjangnya yang aktual dan berkesinambungan. | 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir agar fungsinya tetap baik. |
| | | 2. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja sarana dan prasarana daerah irigasi dan fasilitas penunjangnya. | 1. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. |
| | | 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan air untuk pemenuhan kebutuhan daerah irigasi. | 2. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partisipatif. |
| | | | 1. Pemenuhan kebutuhan akan database irigasi (permukaan, pompa, air tanah dan tambak) dan database bangunan pengambilan air dan konservasi. |
| | | | 2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian sasaran. |
| | | | 1. Pembangunan sarana dan prasarana irigasi dan bangunan pengambilan/konservasi air yang dibutuhkan. |
| | | | 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana irigasi dan bangunan pengambilan/konservasi air agar fungsinya tetap baik. |
| | | | 1. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. |
| | | | 2. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partisipatif. |

Sumber : Hasil Rumusan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ini juga berisi indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone termasuk dalam urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum khususnya yang terkait dengan bidang sumber daya air dengan 4 (empat) program utama sebagaimana telah disinggung pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Program Pengendalian Banjir.

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja program ini adalah persentase sarana dan prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik.

2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja program ini adalah persentase embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik.

3. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja

program ini adalah persentase bangunan pensuplai air baku yang termanfaatkan

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja program ini adalah persentase daerah irigasi yang memiliki nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) minimal baik.

Di samping itu untuk mendukung 4 (empat) program prioritas di atas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone juga melaksanakan lima (lima) program ex-BAU (Belanja Administrasi Umum), antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum.

Secara terperinci tentang rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 6.1.

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|--|---|--|------------|-----------------------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (2019) | | Tahun-2 (2020) | | Tahun-3 (2021) | | Tahun-4 (2022) | | Tahun-5 (2023) | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan | Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman. | Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman. | 1.03.28 | Program Pengendalian Banjir | Persentase Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Dalam Kondisi Baik | 80% | 90% | 60,200,000,000 | 100% | 85,200,000,000 | 100% | 85,200,000,000 | 100% | 85,200,000,000 | 100% | 85,200,000,000 | 100% | 401,000,000,000 | Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Bidang Bina Teknik | Tersebar di beberapa kecamatan | |
| | | | - | 1 | Penyusunan Sistem Informasi/Database Sungai dan Pantai | Jumlah kecamatan yang telah memiliki database sungai dan pantai | - | 5 Kecamatan | 300,000,000 | 5 Kecamatan | 300,000,000 | 5 Kecamatan | 300,000,000 | 5 Kecamatan | 300,000,000 | 7 Kecamatan | 300,000,000 | 27 Kecamatan | 1,500,000,000 | Seksi Rawa dan Pantai; Seksi Data dan Informasi; Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | - | 2 | Perencanaan Prasarana Pengaman Pantai | Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 6 Dokumen | 1,500,000,000 | Seksi Rawa dan Pantai; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.28.09 | 3 | Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai | Panjang fasilitas pengaman pantai yang terbangun selama setahun. | 0.112 Km | 1 Km | 10,000,000,000 | 1 Km | 10,000,000,000 | 1 Km | 10,000,000,000 | 1 Km | 10,000,000,000 | 1 Km | 10,000,000,000 | 5.112 Km | 50,000,000,000 | Seksi Rawa dan Pantai | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.28.03 | 4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai | Panjang bantaran dan tanggul sungai yang terpelihara selama setahun. | 8.717 Km | 5 Km | 49,400,000,000 | 5 Km | 49,400,000,000 | 5 Km | 49,400,000,000 | 5 Km | 49,400,000,000 | 5 Km | 49,400,000,000 | 33.717 Km | 247,000,000,000 | Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.28.07 | 5 | Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali | Panjang sungai/saluran pembuang yang sudah dinormalisasi. | 29.550 Km | - | - | 10 Km | 25,000,000,000 | 10 Km | 25,000,000,000 | 10 Km | 25,000,000,000 | 10 Km | 25,000,000,000 | 75.332 Km | 100,000,000,000 | Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.28.05 | 6 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir | Jumlah kegiatan partisipatif masyarakat yang terlaksana. | NA | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 25 Kegiatan | 500,000,000 | Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air | Kec. T.Riattang Timur |

ngan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 2018-2023

erah (Tabel T-C.27)

Tabel 6. 1. Lanjutan

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
|-----|---|---|------------|-----|--|--|-----------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|--|--------------------------------|
| | | | 1.03.28.11 | 7 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Program Pengendalian Banjir) | Jumlah dokumen monitoring evaluasi yang dilaporkan. | NA | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 5 Dokumen | 500,000,000 | Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik; Semua seksi yang terkait masing-masing kegiatan. | Kec. T.Riattang Timur |
| | Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi. | Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru. | 1.03.26 | | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Persentase Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dalam Kondisi Baik | 70% | 80% | 10,200,000,000 | 100% | 10,200,000,000 | 100% | 10,200,000,000 | 100% | 10,200,000,000 | 100% | 10,200,000,000 | 100% | 51,000,000,000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Bidang Bina Teknik | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | - | 1 | Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung / Konservasi Air Lainnya. | Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 7 Dokumen | 1,500,000,000 | Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduki; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.26.01 | 2 | Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang sudah termanfaatkan. | 265 Unit | 10 Unit | 4,700,000,000 | 10 Unit | 4,700,000,000 | 10 Unit | 4,700,000,000 | 10 Unit | 4,700,000,000 | 10 Unit | 4,700,000,000 | 315 Unit | 23,500,000,000 | Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.26.02 | 3 | Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung air Lainnya | Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dalam kondisi baik. | 265 Unit | 10 Unit | 3,000,000,000 | 10 Unit | 3,000,000,000 | 10 Unit | 3,000,000,000 | 10 Unit | 3,000,000,000 | 10 Unit | 3,000,000,000 | 315 Unit | 15,000,000,000 | Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.26.05 | 4 | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat yang terlaksana. | NA | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 5 Kegiatan | 100,000,000 | 25 Kegiatan | 500,000,000 | Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.26.06 | 5 | Peningkatan konservasi air tanah | Jumlah bangunan konservasi air tanah yang termanfaatkan. | - | 10 Unit | 2,000,000,000 | 10 Unit | 2,000,000,000 | 10 Unit | 2,000,000,000 | 10 Unit | 2,000,000,000 | 10 Unit | 2,000,000,000 | 50 Unit | 10,000,000,000 | Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk | Tersebar di beberapa kecamatan |

Tabel 6. 1. Lanjutan

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
|-----|-----|-----|------------|--|---|-----------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---|----------------|---|--------------------------------|
| | | | 1.03.26.07 | 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya) | Jumlah dokumen monitoring evaluasi yang dilaporkan. | 2 dokumen | 1 dokumen | 100,000,000 | 1 dokumen | 100,000,000 | 1 dokumen | 100,000,000 | 1 dokumen | 100,000,000 | 1 dokumen | 100,000,000 | 7 Dokumen | 500,000,000 | Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik; Semua seksi yang terkait masing-masing kegiatan. | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.25 | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | Persentase Bangunan Penuisplai Air Baku Yang Termanfaatkan | 0% | 10% | 9,500,000,000 | 20% | 8,000,000,000 | 30% | 8,000,000,000 | 40% | 8,000,000,000 | 50% | 8,000,000,000 | 50% | 41,500,000,000 | Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Bidang Bina Teknik | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | - | 1 Penyusunan Sistem Informasi/Database Bangunan Pengambilan Air Baku/Konservasi | Jumlah kecamatan yang telah memiliki database sungai dan pantai | - | 5 Kecamatan | 300,000,000 | 5 Kecamatan | 300,000,000 | 5 Kecamatan | 300,000,000 | 5 Kecamatan | 300,000,000 | 7 Kecamatan | 300,000,000 | 27 Kecamatan | 1,500,000,000 | Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk; Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Data dan Informasi. | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | - | 2 Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Baku | Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. | - | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 7 Dokumen | 1,500,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.25.05 | 3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air | Jumlah DI yang telah memiliki organisasi P3A aktif dan partisipatif. | 4 DI | 4 DI | 1,500,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 DI | 1,500,000,000 | Seksi Konservasi, Danau, Embung dan Waduk; Seksi Bina Kelembagaan; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air. | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.25.03 | 4 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa | Jumlah prasarana pengambilan dan panjang saluran pembawa yang telah dimanfaatkan. | - | 5 Unit Prasarana Pengambilan 1 Km Saluran Pembawa | 4,650,000,000 | 5 Unit Prasarana Pengambilan 1 Km Saluran Pembawa | 4,650,000,000 | 5 Unit Prasarana Pengambilan 1 Km Saluran Pembawa | 4,650,000,000 | 5 Unit Prasarana Pengambilan 1 Km Saluran Pembawa | 4,650,000,000 | 5 Unit Prasarana Pengambilan 1 Km Saluran Pembawa | 4,650,000,000 | 25 Unit Prasarana Pengambilan 5 Km Saluran Pembawa | 23,250,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.25.04 | 5 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah (SAT) | Jumlah Sumur-Sumur Air Tanah (SAT) yang telah dimanfaatkan. | 4 Unit | 10 Unit | 2,650,000,000 | 10 Unit | 2,650,000,000 | 10 Unit | 2,650,000,000 | 10 Unit | 2,650,000,000 | 10 Unit | 2,650,000,000 | 54 Unit | 13,250,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | - | 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku) | Jumlah dokumen monitoring evaluasi yang dilaporkan. | - | 1 dokumen | 100,000,000 | 1 dokumen | 100,000,000 | 1 dokumen | 100,000,000 | 1 dokumen | 100,000,000 | 1 dokumen | 100,000,000 | 7 Dokumen | 500,000,000 | Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik; Semua seksi yang terkait masing-masing kegiatan. | Kec. T.Riattang Timur |

Tabel 6. 1. Lanjutan

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
|-----|-----|--|------------|--|---|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------------------------|
| | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. | 1.03.24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Persentase Daerah Irigasi Yang Memiliki Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) Minimal Baik | NA | 70% | 40,050,000,000 | 75% | 38,530,000,000 | 80% | 30,750,000,000 | 85% | 30,890,000,000 | 90% | 30,650,000,000 | 90% | 170,870,000,000 | Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang Bina Teknik; Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air; Seluruh UPT Dinas | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | Rasio Jaringan | 1.03.24.05 | Perencanaan 1 normalisasi saluran sungai | Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. | 8 Dokumen | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 28 Dokumen | 2,000,000,000 | Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.14 | Rehabilitasi/pemeliharaan 2 haraan normalisasi saluran sungai | Panjang sungai/saluran pembuang yang sudah dinormalisasi. | 29.550 Km | 3 Km | 1,300,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300,000,000 | Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.01 | Perencanaan 3 pembangunan jaringan irigasi | Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 21 Dokumen | 2,000,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku;Seksi Rawa dan Pantai; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | - | Perencanaan 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan haraan jaringan irigasi | Jumlah dokumen perencanaan teknis dalam setahun yang tersusun. | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 4 Dokumen | 400,000,000 | 32 Dokumen | 2,000,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa;Seksi Rawa dan Pantai; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Hidrologi dan Kualitas Air | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.08 | 5 Pembangunan Pintu Air | Jumlah pintu air yang telah dimanfaatkan. | 33 Buah | 10 Buah | 200,000,000 | 10 Buah | 200,000,000 | 10 Buah | 200,000,000 | 10 Buah | 200,000,000 | 10 Buah | 200,000,000 | 83 Buah | 1,000,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.10 | 6 Rehabilitasi/Pemeliharaan haraan Jaringan Irigasi | Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik. | 80,180 Meter | 1,000 Meter | 8,000,000,000 | 1,000 Meter | 8,000,000,000 | 1,000 Meter | 8,000,000,000 | 1,000 Meter | 8,000,000,000 | 1,000 Meter | 8,000,000,000 | 85,180 Meter | 40,000,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.13 | 7 Rehabilitasi/Pemeliharaan haraan Pintu Air | Jumlah pintu air dalam kondisi baik. | 33 Buah | 10 Buah | 150,000,000 | 10 Buah | 150,000,000 | 10 Buah | 150,000,000 | 10 Buah | 150,000,000 | 10 Buah | 150,000,000 | 83 Buah | 750,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | - | 8 Rehabilitasi/Pemeliharaan haraan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun | Jumlah daerah irigasi terbangun yang terlaksana kegiatan OP-nya. | 8 DI | 10 DI | 1,000,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 DI | 1,000,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.15 | 9 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | Jumlah daerah irigasi terbangun yang terlaksana kegiatan OP-nya. | 224 DI | - | - | 10 DI | 1,000,000,000 | 10 DI | 1,000,000,000 | 10 DI | 1,000,000,000 | 10 DI | 1,000,000,000 | 264 DI | 4,000,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa | Tersebar di beberapa kecamatan |

Tabel 6. 1. Lanjutan

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
|-----|-----|-----|------------|-----|---|---|---------------|--------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---|--------------------------------|
| | | | 1.03.24.16 | 10 | Pemberdayaan Petani Pemakai Air | Jumlah DI yang telah memiliki organisasi P3A aktif dan partisipatif. | 30 DI | 30 DI | 300,000,000 | 50 DI | 500,000,000 | 50 DI | 500,000,000 | 64 DI | 640,000,000 | 40 DI | 400,000,000 | 264 DI | 2,340,000,000 | Seksi Bina Kelembagaan; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air. | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.24.17 | 11 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya) | Jumlah dokumen monitoring evaluasi yang dilaporkan. | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 10 Dokumen | 500,000,000 | Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik; Semua seksi yang terkait masing-masing kegiatan. | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | - | 12 | Peningkatan Jaringan daerah Irigasi tambak | Panjang jaringan irigasi tambak yang telah dimanfaatkan dan kondisinya baik. | 8.40 Km | 2.4 Km | 1,200,000,000 | 3.5 Km | 2,100,000,000 | 5 Km | 2,500,000,000 | 5 Km | 2,500,000,000 | 5 Km | 2,500,000,000 | 30.8 Km | 10,800,000,000 | Seksi Rawa dan Pantai | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.21 | 13 | Pembangunan Jaringan Irigasi | Panjang jaringan irigasi yang telah dimanfaatkan. | 416,894 Meter | 10,000 Meter | 15,000,000,000 | 8,000 Meter | 13,300,000,000 | 10,000 Meter | 15,000,000,000 | 10,000 Meter | 15,000,000,000 | 10,000 Meter | 15,000,000,000 | 466,894 Meter | 73,300,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.22 | 14 | Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palakka | Persentase jaringan irigasi kabupaten yang ada di wilayah kerja UPT dalam kondisi baik. | NA | 100% | 100,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 850,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palakka | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.23 | 15 | Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sanrego | Persentase jaringan irigasi kabupaten yang ada di wilayah kerja UPT dalam kondisi baik. | NA | 100% | 100,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 850,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sanrego | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.24 | 16 | Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Salomekko | Persentase jaringan irigasi kabupaten yang ada di wilayah kerja UPT dalam kondisi baik. | NA | 100% | 100,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 850,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Salomekko | Tersebar di beberapa kecamatan |
| | | | 1.03.24.25 | 17 | Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ponre-Ponre | Persentase jaringan irigasi kabupaten yang ada di wilayah kerja UPT dalam kondisi baik. | NA | 100% | 100,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 850,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ponre-Ponre | Tersebar di beberapa kecamatan |

Tabel 6. 1. Lanjutan

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | |
|-----|-----|-----|------------|-----|--|---|--------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | | 1.03.24.26 | 18 | Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Unyi | Persentase jaringan irigasi kabupaten yang ada di wilayah kerja UPT dalam kondisi baik. | NA | 100% | 100,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 850,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Unyi | Tersebar di beberapa kecamatan | |
| | | | 1.03.24.27 | 19 | Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Wollangi | Persentase jaringan irigasi kabupaten yang ada di wilayah kerja UPT dalam kondisi baik. | NA | 100% | 100,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 850,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Wollangi | Tersebar di beberapa kecamatan | |
| | | | 1.03.24.28 | 20 | Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengo | Persentase jaringan irigasi kabupaten yang ada di wilayah kerja UPT dalam kondisi baik. | NA | 100% | 100,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 850,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengo | Tersebar di beberapa kecamatan | |
| | | | 1.03.24.29 | 21 | Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pattiro | Persentase jaringan irigasi kabupaten yang ada di wilayah kerja UPT dalam kondisi baik. | NA | 100% | 100,000,000 | 100% | 150,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 850,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pattiro | Tersebar di beberapa kecamatan | |
| | | | 1.03.24.30 | 22 | Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jaringan Irigasi | Jumlah daerah irigasi (DI) permukaan terdaftar yang telah memiliki database. | 224 DI | 60 DI | 800,000,000 | 56 DI | 780,000,000 | 5 Kecamatan | 500,000,000 | 5 Kecamatan | 500,000,000 | 7 Kecamatan | 500,000,000 | 27 Kecamatan | 3,080,000,000 | Seksi Irigasi dan Air Baku; Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Seksi Data dan Informasi | Tersebar di beberapa kecamatan | |
| | | | | | | Jumlah kecamatan yang telah memiliki database daerah irigasi permukaan baru. | - | 5 Kecamatan | | 5 Kecamatan | | | | | | | | | | | | 27 Kecamatan |
| | | | | | | Jumlah kecamatan yang telah memiliki database irigasi tambak. | - | 2 Kecamatan | | 2 Kecamatan | | | | | | | | | | | | 3 Kecamatan |
| | | | 1.03.24.31 | 23 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat | Jumlah daerah irigasi yang telah direhabilitasi dan dilengkapi fasilitas O&P jaringan irigasi-nya melalui dana bantuan. | NA | 4 DI | 10,000,000,000 | 4 DI | 10,000,000,000 | - | - | - | - | - | 8 DI | 20,000,000,000 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa; Seksi Bina Kelembagaan; Seksi Pengendalian Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air. | Tersebar di beberapa kecamatan | | |

Tabel 6. 1. Lanjutan

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
|--|---|-----------------------------------|------------|--|---|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | 1.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100% | 100% | 1,150,000,000 | 100% | 1,150,000,000 | 100% | 1,150,000,000 | 100% | 1,150,000,000 | 100% | 1,150,000,000 | 100% | 5,750,000,000 | Sekretariat | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.01.02 | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah periode pembayaran rekening setiap tahun. | 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 12 Bulan | 60,000,000 | 12 Bulan | 60,000,000 | 12 Bulan | 60,000,000 | 12 Bulan | 60,000,000 | 12 Bulan | 300,000,000 | Sub Bagian Keuangan | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.01.07 | 2 Administrasi Keuangan | Jumlah aparat yang menerima tunjangan setiap tahun. | Tenaga Kontrak 41 Org; Operator 4 Org; Moderator & Narasumber 16 Org | Tenaga Kontrak 41 Org; Operator 4 Org; Moderator & Narasumber 16 Org | 350,000,000 | Tenaga Kontrak 41 Org; Operator 4 Org; Moderator & Narasumber 16 Org | 350,000,000 | Tenaga Kontrak 41 Org; Operator 4 Org; Moderator & Narasumber 16 Org | 350,000,000 | Tenaga Kontrak 41 Org; Operator 4 Org; Moderator & Narasumber 16 Org | 350,000,000 | Tenaga Kontrak 41 Org; Operator 4 Org; Moderator & Narasumber 16 Org | 350,000,000 | Tenaga Kontrak 41 Org; Operator 4 Org; Moderator & Narasumber 16 Org | 1,750,000,000 | Sub Bagian Keuangan | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.01.13 | 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang tersedia setiap tahun. | 35 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30,000,000 | 35 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30,000,000 | 35 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30,000,000 | 35 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30,000,000 | 35 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30,000,000 | 35 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.01.15 | 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah media/buku yang tersedia dalam setahun. | 10 Media/Buku | 10 Media/Buku | 50,000,000 | 10 Media/Buku | 50,000,000 | 10 Media/Buku | 50,000,000 | 10 Media/Buku | 50,000,000 | 10 Media/Buku | 50,000,000 | 10 Media/Buku | 250,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.01.23 | 5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah SPPD dalam setahun. | 60 SPPD | 60 SPPD | 600,000,000 | 60 SPPD | 600,000,000 | 60 SPPD | 600,000,000 | 60 SPPD | 600,000,000 | 60 SPPD | 600,000,000 | 300 Kali | 3,000,000,000 | Sub Bagian Keuangan | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.01.24 | 6 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah perlengkapan administrasi perkantoran yang terpakai dalam setahun. | 40 Jenis ATK; 50.000 Rangkap; 2 Jenis Makan Minum Yang Tersedia. | 40 Jenis ATK; 50.000 Rangkap; 2 Jenis Makan Minum Yang Tersedia. | 60,000,000 | 40 Jenis ATK; 50.000 Rangkap; 2 Jenis Makan Minum Yang Tersedia. | 60,000,000 | 40 Jenis ATK; 50.000 Rangkap; 2 Jenis Makan Minum Yang Tersedia. | 60,000,000 | 40 Jenis ATK; 50.000 Rangkap; 2 Jenis Makan Minum Yang Tersedia. | 60,000,000 | 40 Jenis ATK; 50.000 Rangkap; 2 Jenis Makan Minum Yang Tersedia. | 60,000,000 | 40 Jenis ATK; 50.000 Rangkap; 2 Jenis Makan Minum Yang Tersedia. | 300,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) | 100% | 100% | 1,650,000,000 | 100% | 2,101,000,000 | 100% | 2,252,100,000 | 100% | 2,403,310,000 | 100% | 2,554,641,000 | 100% | 10,961,051,000 | Sekretariat | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.02.05 | 1 Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah kendaraan dinas dalam setahun yang terpakai. | 5 Mobil 10 Motor | 1 Mobil 4 Motor | 600,000,000 | 1 Mobil 4 Motor | 600,000,000 | 1 Mobil 4 Motor | 600,000,000 | 1 Mobil 4 Motor | 600,000,000 | 1 Mobil 4 Motor | 600,000,000 | 10 Mobil 30 Motor | 3,000,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |

Tabel 6. 1. Lanjutan

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
|-----|-----|-----|------------|---|---|---|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | 1.03.02.07 | Pengadaan 2 Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor. | 10 Unit AC 1 Unit TV 2 Set Gorden 1 Unit Sound Sistem 2 Unit LCD 1 Unit Kamera Digital | 5 Unit AC, 1 Unit TV, 2 set Gorden, 1 Sound Sistem | 200,000,000 | 11 Unit AC, 1 Unit TV, 2 set Gorden, Sound Sistem, 1 Kamera, 5 Alat komunikasi, 3 Alat ukur Topografi, 5 Alat ukur Hidroklimatologi, 2 Handycam, 9 CCTV | 500,000,000 | 11 Unit AC, 1 Unit TV, 2 set Gorden, Sound Sistem, 1 Kamera, 5 Alat komunikasi, 3 Alat ukur Topografi, 5 Alat ukur Hidroklimatologi, 2 Handycam, 9 CCTV | 500,000,000 | 11 Unit AC, 1 Unit TV, 2 set Gorden,1 Sound Sistem, 1 Kamera, 5 Alat komunikasi, 3 Alat ukur Topografi, 5 Alat ukur Hidroklimatologi, 2 Handycam, 9 CCTV | 500,000,000 | 11 Unit AC, 1 Unit TV, 2 set Gorden, 1 Sound Sistem, 1 Kamera, 5 Alat komunikasi, 3 Alat ukur Topografi, 5 Alat ukur Hidroklimatologi, 2 Handycam, 9 CCTV | 500,000,000 | 26 Unit AC, 1 Unit TV, 6 set Gorden, Sound Sistem, 1 Kamera, 5 Alat komunikasi, 2 Unit LCD, 3 Alat ukur Topografi, 5 Alat ukur Hidroklimatologi, 2 Handycam, 9 CCTV | 2,200,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.02.09 | Pengadaan 3 Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan kerja. | 16 Unit Komputer PC 7 Unit Laptop 14 Printer | 5 Unit Komputer PC, 5 Unit Laptop, 3 Printer | 300,000,000 | 5 Unit Komputer PC, 5 Unit Laptop, 3 Printer | 300,000,000 | 5 Unit Komputer PC, 5 Unit Laptop, 3 Printer | 300,000,000 | 5 Unit Komputer PC, 5 Unit Laptop, 3 Printer | 300,000,000 | 5 Unit Komputer PC, 5 Unit Laptop, 3 Printer | 300,000,000 | 8 Unit Komputer PC, 2 Unit Laptop, 3 Printer | 1,500,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.02.10 | Pengadaan 4 Mebeuleur | Jumlah meubeleur kantor dalam setahun. | 20 Buah Meja Kerja, 20 Buah Kursi Kerja, 20 Lemari arsip, 20 Filling Kabinet | 6 Buah Meja Kerja, 6 Buah Kursi Kerja | 40,000,000 | 6 Buah Meja Kerja, 6 Buah Kursi Kerja, 6 Lemari arsip, 6 Filling Kabinet | 40,000,000 | 6 Buah Meja Kerja, 6 Buah Kursi Kerja, 6 Lemari arsip, 6 Filling Kabinet | 40,000,000 | 6 Buah Meja Kerja, 6 Buah Kursi Kerja, 6 Lemari arsip, 6 Filling Kabinet | 40,000,000 | 6 Buah Meja Kerja, 6 Buah Kursi Kerja, 6 Lemari arsip, 6 Filling Kabinet | 40,000,000 | 50 Buah Meja Kerja, 50 Buah Kursi Kerja, 50 Lemari arsip, 50 Filling Kabinet | 200,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | ... | Pengadaan Mesin 5 Kartu Absensi | Jumlah mesin absensi yang berfungsi. | 0 Buah | 7 Buah | 50,000,000 | 7 Buah | 50,000,000 | 7 Buah | 50,000,000 | 7 Buah | 50,000,000 | 7 Buah | 50,000,000 | 7 Buah | 250,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.02.22 | Pemeliharaan 6 Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dalam setahun. | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 300,000,000 | 1 Kegiatan | 300,000,000 | 1 Kegiatan | 300,000,000 | 1 Kegiatan | 300,000,000 | 1 Kegiatan | 300,000,000 | 5 Kegiatan | 1,500,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.02.24 | Pemeliharaan 7 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan operasional dinas dalam kondisi baik. | 5 Mobil 10 Motor | 6 Mobil 14 Motor | 150,000,000 | 7 Mobil 18 Motor | 300,000,000 | 8 Mobil 22 Motor | 450,000,000 | 9 Mobil 26 Motor | 600,000,000 | 10 Mobil 30 Motor | 750,000,000 | 10 Mobil 30 Motor | 2,250,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.02.28 | Pemeliharaan 8 Rutin/Berkala Peralatan Gedung | Jumlah peralatan gedung dalam kondisi baik setiap tahun. | 21 Buah | 21 Buah | 10,000,000 | 21 Buah | 11,000,000 | 21 Buah | 12,100,000 | 21 Buah | 13,310,000 | 21 Buah | 14,641,000 | 21 Buah | 61,051,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |

Tabel 6. 1. Lanjutan (selesai)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
|-----|-----|-----|------------|--|--|--|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|---|---------------|--|-----------------------|
| | | | 1.03.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur yang Telah Mengikuti Diklat Formal dan Non Formal (%) | 100% | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 200,000,000 | 100% | 1,000,000,000 | Sekretariat | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.05.01 | 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparat dinas yang telah mengikuti diklat formal yang dipersyaratkan. | 7 Orang Diklatpim 8 Orang Diklat lainnya | 9 Orang Diklatpim 10 Orang Diklat lainnya | 100,000,000 | 11 Orang Diklatpim 15 Orang Diklat lainnya | 100,000,000 | 14 Orang Diklatpim 20 Orang Diklat lainnya | 100,000,000 | 17 Orang Diklatpim 25 Orang Diklat lainnya | 100,000,000 | 20 Orang Diklatpim 30 Orang Diklat lainnya | 100,000,000 | 20 Orang Diklatpim 30 Orang Diklat lainnya | 500,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.05.02 | 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kegiatan bimtek/diklat non formal yang telah diadakan | 5 Kali | 2 Kali | 100,000,000 | 2 Kali | 100,000,000 | 2 Kali | 100,000,000 | 2 Kali | 100,000,000 | 15 Kali | 100,000,000 | 100 Orang | 500,000,000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) | 100% | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 100,000,000 | Sekretariat | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.06.01 | 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Jumlah dokumen laporan kinerja beserta pendukungnya dalam setahun. | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20,000,000 | 5 Dokumen | 20,000,000 | 5 Dokumen | 20,000,000 | 5 Dokumen | 20,000,000 | 6 Dokumen | 20,000,000 | 31 Dokumen | 100,000,000 | Sub Bagian Program | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.08 | Program Penunjang Pemerintahan Umum | Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%) | 100% | 100% | 80,000,000 | 100% | 84,000,000 | 100% | 88,400,000 | 100% | 93,240,000 | 100% | 98,564,000 | 100% | 444,204,000 | Sekretariat; Bidang Bina Teknik | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.08.01 | 1 Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan kerja yang telah disusun. | 10 Dokumen (Renstra, RKA, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan) | 6 Dokumen (Renstra, RKA, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan) | 40,000,000 | 5 Dokumen (RKA, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan) | 44,000,000 | 5 Dokumen (RKA, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan) | 48,400,000 | 5 Dokumen (RKA, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan) | 53,240,000 | 5 Dokumen (RKA, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan) | 58,564,000 | 26 Dokumen | 244,204,000 | Sub Bagian Program; Seksi Perencanaan Bina Teknik; Seksi Monitoring Evaluasi Bina Teknik | Kec. T.Riattang Timur |
| | | | 1.03.08.03 | 2 Promosi dan Pameran Pembangunan | Jumlah kegiatan pameran yang telah dilaksanakan. | 3 Kegiatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 8 Kegiatan | 200,000,000 | Seksi Data dan Informasi | Kec. T.Riattang Timur |

Sumber : Hasil Rumusan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini akan dikemukakan indikator kinerja utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini merupakan indikator kinerja utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati terkait dengan penetapan indikator utama dari setiap organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bone. Indikator-indikator ini juga telah disinggung dalam pembahasan Bab IV sebagaimana yang telah lalu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terjabarkan dalam 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru, **dalam** % (persen).
- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, **dalam** % (persen).
- Rasio jaringan irigasi, , **dalam** M/Ha (meter per hektar).

Selengkapnya penjabaran indikator-indikator di atas beserta target capaian tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 7.1 (Tabel T-C.28).

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

| NO | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023) |
|----|---|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | TAHUN KE-1 (2019) | TAHUN KE-2 (2020) | TAHUN KE-3 (2021) | TAHUN KE-4 (2022) | TAHUN KE-5 (2023) | |
| 1. | Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru. | 20.00% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 2. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. | 78.10% | 79% | 81% | 82% | 84% | 85% | 85% |
| 3. | Rasio jaringan irigasi. | 4.30 M/Ha | 4.68 M/Ha | 5.05 M/Ha | 5,44 M/Ha | 5.83 M/Ha | 6.21 M/Ha | 6.21 M/Ha |

Sumber : Hasil Rumusan.

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Rancangan Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Rancangan Renstra ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Rancangan Renstra ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan menjadi pedoman bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018-2023.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2018-2023 ke dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Rancangan Renstra Tahun 2018-2023. Selain hal-hal yang tersebut di atas, adanya penguatan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone merupakan faktor yang sangat penting dan dibutuhkan adanya.

Terakhir, sebagai catatan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Bone, Rancangan Renstra ini sudah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan Rancangan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Rancangan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun harapannya alokasi anggaran dapat dipenuhi sesuai kebutuhan agar target sasaran Rancangan Renstra dapat tercapai dan kondisi cuaca yang kondusif, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan sehingga target sasaran pada Rancangan Renstra ini dapat tercapai.

Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan

TUJUAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air

SASARAN

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air

INDIKATOR

Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Penunjang Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

Pengadaan Mebeuleur

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Mesin Kartu Absensi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Misi 4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

SASARAN

Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman.

INDIKATOR

Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman.

Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing.

Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi.

PROGRAM

Program Pengendalian Banjir

Pembangunan Prasarana Pantai

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengendalian Banjir

SASARAN

Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi.

INDIKATOR

Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru.

INDIKATOR

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Rasio Jaringan Irigasi.

PROGRAM

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung air Lainnya

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber

Peningkatan konservasi air tanah

Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah (SAT)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengendalian Banjir

PROGRAM

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ponre-Ponre

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Unyi

Perencanaan Pembangunan jaringan Irigasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi

Peningkatan Jaringan daerah irigasi tambak

Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengo

Pembangunan Pintu Air

Pembangunan Jaringan Irigasi

Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pattica

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palakka

Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jaringan Irigasi

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sanrego

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

Peningkatan Pelayanan Operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

PENANGGUNG JAWAB

SEKERTARIAT

BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK

BIDANG SUNGAI,DANAU DAN WADUK, BIDANG BINA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BIDANG IRIGASI,RAWA, PANTAI DAN AIR BAKU, BIDANG BINA TEKNIK DAN BIDANG BINA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR